



PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021



MOTTO "CERDAS"

Jln.Diponegoro-Wolomarang-Maumere

Telp.(0382) 21134/23514

Website : pa-maumere.go.id | Email : pa.maumere@gmail.com

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



SURATNAH BAO, S.Ag., M.H
KETUA

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Laporan Tahunan Pengadilan Agama Maumere Tahun 2021 dapat kami susun dan kami sampaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Penggunaan sistem TI (Teknologi Informasi) yang semakin pesat membuat peningkatan bentuk-bentuk penyajian pelaporan dinamis dan akuntabel atas gambaran kinerja yang telah dilakukan.

Dalam laporan ini kami sajikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pokok yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu alat kelengkapan negara bidang pelayanan masyarakat di bidang hukum tertentu di wilayah hukum Kabupaten Sikka.

Laporan ini adalah informasi gambaran riil keberhasilan pelaksanaan tugas pokok selama tahun 2021 dan hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya, dimaksudkan pula untuk internal sebagai dasar evaluasi penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya dan untuk institusi yang berwenang agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Demi peningkatan penyusunan Laporan Tahunan di tahun yang akan datang, segala saran konstruktif dari para pengguna laporan ini sangat kami harapkan.

Dalam penyajian format dan substansi laporan ini mungkin ada kekurangan mohon pembenahan dan saran seperlunya.

Wassalam,
Maumere, 03 Januari 2022

Ketua



SURATNAH BAO, S.Ag., M.H
NIP. 19740301 200604 2 001



Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kebijakan Umum Pengadilan Agama Maumere	12
B. Visi dan misi	15
C. Rencana Strategis (Renstra)	16
D. Reviu Indikator Kinerja Utama	20
BAB II KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA	24
A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA.....	24
1. Keadaan Perkara tingkat pertama	27
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	28
3. Keadaan perkara tingkat kasasi.....	28
4. Keadaan perkara tingkat peninjauan kembali	28
B. PENYELESAIAN PERKARA	29
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	30
2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	31
3. Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK	33
4. Jumlah Perkara yang berhasil dimediasi	33
5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui Diversi	34
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKAT ISO PEGADILAN)	34
1. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).....	34
2. Sidang keliling	36
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).....	37
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	39
A. Komposisi Sumber daya Manusia (SDM) berdasarkan kepangkatan	

Golongan, dan Pendiakaan	39
1. Mutasi	50
2. Promosi	52
3. Pensiun.....	52
4. Diklat teknis dan Non Teknis	52
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN	
TEKNOLOGI INFORMASI	55
A. Pengelolaan Keuangan	55
1. Unit Organisasi (01) Badan Urusan Organisasi.....	55
2. Unit Organisasi (04) Dirjen Badilag.....	58
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	60
1. Matriks sarana dan prasarana gedung.....	61
2. Matriks Barang Milik Negara	61
3. Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana	65
4. Administrasi Tata Persuratan	66
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	67
1. Implementasi e-court	68
2. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	69
BAB V PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA.....	72
1. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	72
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	78
3. Inovasi Pelayanan Publik	80
BAB VI PENGAWASAN	86
1. Internal.....	86
2. Evaluasi	90
BAB VII PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Rekomendasi.....	96

LAMPIRAN

1. SK TIM Penyusun Laporan tahunan Pengadilan Agama Maumere
tahun 202198
2. Foto-foto Kegiatan Pengadilan Agama Maumere tahun 2021 102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Gambar. 1. Foto Gedung Kantor PA. Maumere



Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan*

Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan PeradilanTata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” dengan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya bab IX tentang kekuasaan kehakiman, sebagai respon terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dan sebagai tindaklanjut dari penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dimasyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undangtersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan lahirlah Undang-undangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal 21 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa “organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan **Peradilan Satu Atap**.

Sementara itu, dalam pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut untuk peradilan agama lahirilah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Gerakan pembaharuan peradilan selalu ditingkatkan dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan dibawahnya, segala inovasi dicanangkanguna memenuhi peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dimulai dengan ditetapkannya *Blue Print* (Cetak Biru) 2010-2035, Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, Road Map Penerapan Cetak Biru, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, Akreditasi Penjaminan Mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pendaftaran perkara secara elektronik (*E-Court*) dengan komponen pendaftaran (*E-Filing*), pembayaran (*E-Payment*), Pemanggilan (*E-Summon*), Biaya Prodeo, biaya Sidang Keliling dan *E-Litigasi* serta audio pencegahan gratifikasi yang wajib setiap hari dibacakan, hal ini merupakan terobosan baru guna menyongsong Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya menuju era baru peradilan modern berbasis Teknologi Informasi (TI).

Bukan hanya Mahkamah Agung RI yang berupaya melakukan terobosan dan pembaharuan yang terus menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat pencari keadilan, Badan Peradilan Agama juga mengeluarkan 13 (tiga belas) aplikasi unggulan guna mendukung secara maksimal program kerja Mahkamah Agung RI. Adapun 13 aplikasi yang di maksud yaitu :

1. Aplikasi antrian sidang;
2. Aplikasi notifikasi perkara;
3. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan;
4. Aplikasi E-Register;
5. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan;
6. Aplikasi E-Kuangan;

7. Command Center;
8. Aplikasi PNBP Fungsional;
9. Aplikasi Validasi Akta Cerai;
10. Aplikasi Gugatan Mandiri.
11. E-Laporan
12. Vision
13. CCTV Online.

Pengadilan Agama Maumere, sebagai pengadilan Tingkat Pertama (*Judexfacti*) merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sejak saat itu tugas dan wewenang Pengadilan Agama bertambah yaitu, Memeriksa, Memutus dan menyelesaikan setiap perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

Merespon program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung maupun Dirjen Badilag berdasarkan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Maumere, program-program tersebut diatas walaupun dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia, administrasi, finansial, Sarana dan prasarana tetapi Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan seluruh program tersebut baik Program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI maupun 11 (sebelas) aplikasi unggulan Dirjen Badan Peradilan Agama dengan prinsip pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), dan 5R (*Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin*) serta Indah dan Nyaman demi memenuhi kebutuhan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Walaupun dalam pelaksanaannya belum secara optimal karena masih terdapat kendala-kendala dalam implementasi aplikasi tersebut, seperti aplikasi PNBP *On-line*

yang secara realitasnya masih terdapat beberapa konten dalam aplikasi tersebut belum lengkapsesuai kebutuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga kami sangat mengharapkan kepada tim pengembangan aplikasi pada instansi Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan Agama untuk segera membenahi kekurangan-kekurangan dalam optimalisasi aplikasi yang telah dirilis guna lebih memaksimalkan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu Pengadilan yang melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang dulunya SAPM di Tahun 2018 dan telah mendapatkan nilai dengan predikat A “*Excellent*”, Pengadilan Agama Maumere juga pada Tanggal 19 s.d. 20 Oktober Tahun 2020 telah menyelesaikan *Assesmen Surveillance I* oleh Asessor eksternal, dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 3955/DjA.3/HM.00/11/2020 Tanggal 30 November 2020 perihal Hasil Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2020, dengan ucapan rasa syukur yang tak terhingga karena Pengadilan Agama Maumere dapat mempertahankan prestasi yang telah dicapai sebelumnya dengan predikat A “*Excellent*”, capaian ini tidak lain dari sebuah wujud komitmen dan kebersamaan dengan nilai-nilai kekeluargaan dari seluruh aparatur dalam mewujudkan implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Agama Maumere, tak berhenti sampai disitu Pengadilan Agama Maumere di



tahun 2021 juga mendapatkan penghargaan pelaksanaan kinerja yaitu Keberhasilan mencapai Peringkat ke-2 dalam penilaian pelaksanaan E-Letigasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Tahun 2021, yang penghargaanannya di berikan oleh PTA Kupang yang diserahkan tanggal 02 Oktober 2021;

Gambar 2. Foto Penyerahan Piagam Penghargaan Peringkat ke 2 Penilaian Kinerja E-Letigasi

Pengadilan Agama Maumere tak pernah surut dalam berbenah diri baik dalam hal peningkatan kualitas kinerja, memberikan pelayanan secara internal maupun dalam pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, Sebagai tindak lanjut dari sebuah pembaharuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Maumere

berdasarkan kompetensi tugas dan wewenang juga telah melaksanakan dan mengimplementasikan 6 (enam) area perubahan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari :

1. Manajemen Perubahan (pola pikir dan budaya kerja)
2. Penataan Tata Laksana;
3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Penguatan Pengawasan;
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pengadilan Agama Maumere berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Maumere berkedudukan di Kota Maumere dengan letak geografis antara 806'36"LS – 8048'0"LS dan 121040'12"BT – 122041'24"BT yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dengan wilayah hukum terdiri dari 21 Kecamatan dan 160 Kelurahan/Desa yang tersebar sebagaimana berikut :

Tabel 1. Daftar Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere Tahun 2021

No	Nama Kecamatan dan Kelurahan/Desa		Radius	Jarak (Km)
1	2		3	4
1	Kecamatan Alok			
	1	Kel. Kota Uneng	I	0 – 20 Km
	2	Kel. Nagalimang	I	0 – 20 Km
	3	Kel. Madawat	I	0 – 20 Km
	4	Kel. Kabor	I	0 – 20 Km
	5	Desa Pemana	Antar Pulau I	-
	6	Desa Gunung Sari	Antar Pulau I	-
	7	Desa Samparong	Antar Pulau IV	-
2	Kecamatan Alok Timur			
	1	Kel Waioti	I	0 – 20 Km
	2	Kel. Kota Baru	I	0 – 20 Km
	3	Kel. Beru	I	0 – 20 Km
	4	Kel. Wairotang	I	0 – 20 Km
	5	Kel. Nangameting	I	0 – 20 Km
	6	Desa Lepolima	Antar Pulau V	-

	7	Desa Watugong	II	-
	8	Desa Kojadoi	Antar PulauIII	-
	9	Desa Kojagete	Antar PulauIII	-
	10	Desa Parumaan	Antar PulauII	-
3	Kecamatan Alok Barat			
	1	Kel. Wuring	I	0 – 20 Km
	2	Kel. Hewuli	I	0 – 20 Km
	3	Kel. Wailiti	I	0 – 20 Km
	4	Kel. Wolomarang	I	0 – 20 Km
4	Kecamatan Nita			
	1	Desa Tilang	I	0 – 20 Km
	2	Desa Lusitada	I	0 – 20 Km
	3	Desa Bloro	I	0 – 20 Km
	4	Desa Tebuk	I	0 – 20 Km
	5	Desa Nita	I	0 – 20 Km
	6	Desa Takaplager	II	20 – 40 Km
	7	Desa Nitaloang	II	20 – 40 Km
	8	Desa Wuliwutik	II	20 – 40 Km
	9	Desa Ladogahar	II	20 – 40 Km
	10	Desa Riit	II	20 – 40 Km
	11	Desa Nirangkuling	II	20 – 40 Km
	12	Desa Maheboro	II	20 – 40 Km
5	Kecamatan Lela			
	1	Desa Kolidetung	II	20 – 40 Km
	2	Desa korowuwu	II	20 – 40 Km
	3	Desa Hepang	II	20 – 40 Km
	4	Desa Lela	II	20 – 40 Km
	5	Desa Watutedang	II	20 – 40 Km
	6	Desa Sikka	II	20 – 40 Km
	7	Desa Ligai	II	20 – 40 Km
	8	Desa Baopaat	II	20 – 40 Km
	9	Desa Du	II	20 – 40 Km
6	Kecamatan Kewapante			
	1	Desa Umagera	II	20 – 40 Km
	2	Desa Lantena	II	20 – 40 Km
	3	Desa Kopong	II	20 – 40 Km
	4	Desa Seusina	II	20 – 40 Km
	5	Desa Namangkewa	II	20 – 40 Km
	6	Desa Waiera	II	20 – 40 Km
	7	Desa Geliting	II	20 – 40 Km

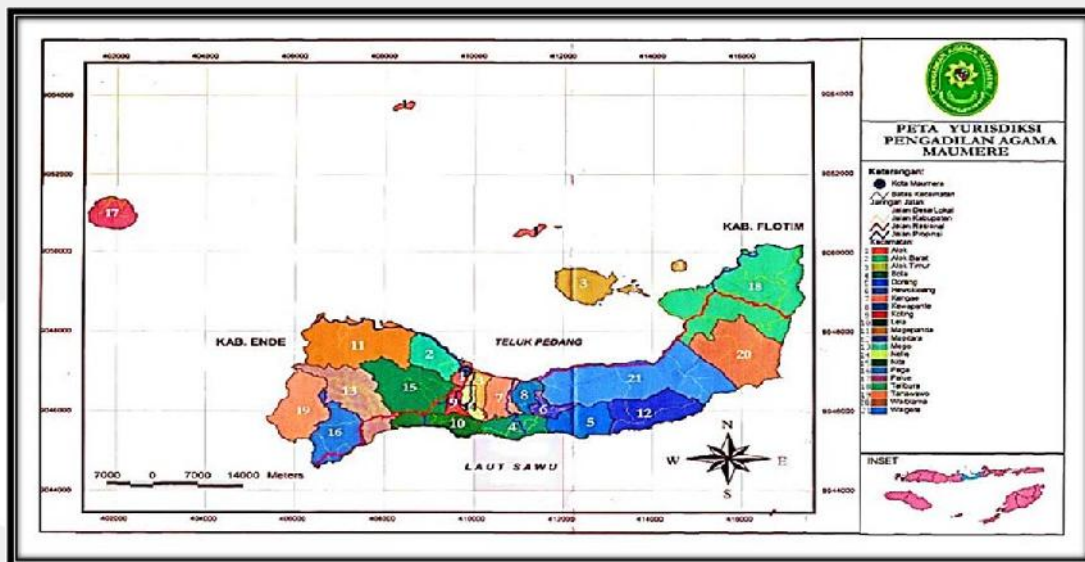
	8	Desa Wairkoja	II	20 – 40 Km
7	Kecamatan Bola			
	1	Desa Hokor	III	40 – 60 Km
	2	Desa Wolonwalu	III	40 – 60 Km
	3	Desa Wolokoli	III	40 – 60 Km
	4	Desa Bolo	III	40 – 60 Km
	5	Desa Umuta	III	40 – 60 Km
	6	Desa ipir	III	40 – 60 Km
8	Kecamatan Waigete			
	1	Desa Pogon	II	20 – 40 Km
	2	Desa Aiburua	II	20 – 40 Km
	3	Desa Wairbleler	II	20 – 40 Km
	4	Desa Hoder	II	20 – 40 Km
	5	Desa Egon	II	20 – 40 Km
	6	Desa Nangatobong	II	20 – 40 Km
	7	Desa Waiaeterang	II	20 – 40 Km
	8	Desa Watudiran	II	20 – 40 Km
	9	Desa Rumut	II	20 – 40 Km
9	Kecamatan Talibura			
	1	Desa Talibura	Daerah SulitI	-
	2	Desa Darat Gunung	Daerah Sulit I	-
	3	Desa Darat Pantai	Daerah Sulit I	-
	4	Desa Nebe	Daerah Sulit I	-
	5	Desa Hikong	Daerah SulitI	-
	6	Desa Kringa	Daerah Sulit I	-
	7	Desa Ojang	Daerah Sulit I	-
	8	Desa Wailamung	Daerah Sulit I	-
	9	Desa Lewomodo	Daerah SulitI	-
	10	Desa Timutawa	Daerah Sulit I	-
	11	Desa Bangko'or	Daerah Sulit I	-
	12	Desa Nangahale	Daerah SulitI	-
10	Kecamatan Nele			
	1	Desa Nelle Wutung	I	0 – 20 Km
	2	Desa Nelle Lorang	I	0 – 20 Km
	3	Desa Manuburu	I	0 – 20 Km
	4	Desa Nelee Barat	I	0 – 20 Km
	5	Desa Nelle Urung	I	0 – 20 Km
11	Kecamatan Magepanda			
	1	Desa Kolisia A	II	20 – 40 Km
	2	Desa Magepanda	II	20 – 40 Km

	3	Desa Reroroja	II	20 – 40 Km
	4	Desa Kolisia B	II	20 – 40 Km
	5	Desa Done	II	20 – 40 Km
12	Kecamatan Koting			
	1	Desa Koting A	I	0 – 20 Km
	2	Desa Koting B	I	0 – 20 Km
	3	Desa Koting C	I	0 – 20 Km
	4	Desa Koting D	I	0 – 20 Km
	5	Desa Paubekor	I	0 – 20 Km
	6	Desa Ribang	I	0 – 20 Km
13	Kecamatan Hewokloang			
	1	Desa Hewopkloang	II	20 – 40 Km
	2	Desa Hewopuat	II	20 – 40 Km
	3	Desa Wolompa	II	20 – 40 Km
	4	Desa Rubit	II	20 – 40 Km
	5	Desa Baomekot	II	20 – 40 Km
	6	Desa Munerana	II	20 – 40 Km
	7	Desa Kajowair	II	20 – 40 Km
14	Kecamatan Kangae			
	1	Desa Teka iku	II	20 – 40 Km
	2	Desa Mekendetung	Daerah SulitI	
	3	Desa Blatation	II	20 – 40 Km
	4	Desa Kokowahor	II	20 – 40 Km
	5	Desa Watumilok	II	20 – 40 Km
	6	Desa Tanaduen	II	20 – 40 Km
	7	Desa Watuliwung	II	20 – 40 Km
	8	Desa Habi	II	20 – 40 Km
	9	Desa Langir	II	20 – 40 Km
15	Kecamatan Doreng			
	1	Desa Wolomotong	III	40 – 60 Km
	2	Desa Kloangpopot	III	40 – 60 Km
	3	Desa Wogalirit	III	40 – 60 Km
	4	Desa Waihawa	III	40 – 60 Km
	5	Desa Nenbura	III	40 – 60 Km
	6	Desa Wolonterang	III	40 – 60 Km
	7	Desa waturerak	III	40 – 60 Km
16	Kecamatan Mapitara			
	1	Desa Natakoli	III	40 – 60 Km
	2	Desa Hebing	III	40 – 60 Km
	3	Desa Hale	III	40 – 60 Km

	4	Desa Egongahar	III	40 – 60 Km
17	Kecamatan Waiblama			
	1	Desa Natarmage	III	40 – 60 Km
	2	Desa Pruda	III	40 – 60 Km
	3	Desa Werang	Daerah Sulit I	-
	4	Desa Tanarawa	Daerah SulitI	-
	5	Desa Linmedo	Daerah Sulit I	-
	6	Desa Tua Bao	Daerah SulitI	-
18	Kecamatan Paga			
	1	Desa Wolowiro	Daerah SulitI	-
	2	Desa Maulo'o	Daerah SulitI	-
	3	Desa Mbegu	Daerah SulitI	-
	4	Desa Paga	III	40 – 60 Km
	5	Desa Lenanderata	Daerah SulitI	-
	6	Desa Masebewa	Daerah SulitI	-
	7	Desa Wolorega	Daerah SulitI	-
	8	Desa Wolowena	Daerah SulitI	-
19	Kecamatan Mego			
	1	Desa Korobhera	Daerah SulitII	-
	2	Desa Dobo	Daerah SulitII	-
	3	Desa Bhera	Daerah SulitII	-
	4	Desa Wolodhesa	Daerah SulitII	-
	5	Desa Gera	Daerah SulitII	-
	6	Desa Liakutu	Daerah SulitII	-
	7	Desa Parabubu	Daerah SulitII	-
	8	Desa Dobo Nua Pu'a	Daerah SulitII	-
	9	Desa Kowi	Daerah SulitII	-
	10	Desa Napugera	Daerah SulitII	-
20	Kecamatan Tanawawo			
	1	Desa Bu Selatan	Daerah SulitII	-
	2	Desa Detubinga	Daerah SulitII	-
	3	Desa Bu Utara	Daerah SulitII	-
	4	Desa Bu Watuweti	Daerah SulitII	-
	5	Desa Loke	Daerah SulitII	-
	6	Desa Renggarasi	Daerah SulitII	-
	7	Desa Poma	Daerah SulitII	-
	8	Desa Tuwa	Daerah SulitII	-
21	Kecamatan Palue			
	1	Desa Maluriwu	Antar PulauV	-
	2	Desa Rokirolet	Antar Pulau V	-

3	Desa Tuanggeo	Antar Pulau V	-
4	Desa Ladolaka	Antar Pulau V	-
5	Desa Nitunglea	Antar Pulau V	-
6	Desa Reruwaire	Antar Pulau V	-
7	Desa Kesokoja	Antar Pulau V	-
8	Desa Lidi	Antar Pulau V	-

Gambar 3. Foto Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere



Sebagai daerah yang berada di Kepulauan Flores dituntut untuk lebih memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi (TI) untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan terhadap para pencari keadilan, serta untuk memenuhi tuntutan keterbukaan informasi publik yang menjadi salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) oleh Pengadilan Agama Maumere sebagai bagian mewujudkan peningkatan transparansi pengadilan sebagaimana amanah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sudah dilakukandengan menyediakan media *Website* : www.pa-maumere.go.id. yang dapat di akses oleh masyarakat pencari keadilan secara umum, serta media Teknologi Informasi (TI) pendukung lainnya khusus internal aparatur Pengadilan Agama Maumere yaituplikasi Pengelolaan Data dan Pengusulan Pegawai dengan Sistim Informasi Kepegawaian (SIKEP) MARIdan *Aplikasi Backup Sikep*(ABS)Badilag MARI, Aplikasi Komdanas (Biaya Perkara, Kepegawaian dan

Keuangan), Aplikasi PNPB SIMARI, E-Biling Simponi, Movev Bappenas, SAKPA, SILABI, dan email :pa.maumere@gmail.com.

B. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas, Pengadilan Agama Maumere telah menyusun program kerja sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Maumere dalam pencapaian Visi dan Misi serta tujuan organisasi.

Visi

Visi Pengadilan Agama Maumere mengacu pada visi Mahkamah Agung RI yaitu **“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MAUMERE YANG AGUNG”**.

Misi

Sedangkan untuk mencapai Visi tersebut Pengadilan Agama Maumere menetapkan Misi sebagai berikut:

1. **Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Maumere;**
2. **Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan;**
3. **Meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas aparatur Pengadilan Agama Maumere;**
4. **Meningkatkan pengawasan dan transparansi di Pengadilan Agama Maumere.**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Maumere tersebut, perlu membuat Motto sebagai identitas dan suplemen penyemangat kepada seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere, adapun Motto Pengadilan agama Maumere adalah **“CERDAS”** (*Cakap, Efektif dan Efisien, Ramah, Dinamis, Akuntabel, Sinergitas*).

Motto dan Visi Misi juga rutin dibaca bersama setiap apel pagi pada hari senin.

C. Rencana Strategis (Renstra)

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, Pengadilan Agama Maumere mengambil langkah-langkah kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Strategi (RENSTRA).

Dengan rencana strategis ini maka implementasi target, output dan out come yang diinginkan tercapai. Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere telah dibuat sejak tahun 2015, terakhir disusun Rencana Strategis 2015-2019 yang sudah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan kerja untuk tahun 2020.

Adapun Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere tahun 2020-2024 tersebut sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Maumere

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang prima dan berkeadilan kepada

Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Profesionalitas dan kredibilitas aparatur Pengadilan

Agama Maumere

4. Meningkatkan pengawasan dan Transparansi di Pengadilan Agama Maumere

Tabel. 2. Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target%				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara	90		Persentase Perkara	90	90	90	90	90

		yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding					
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	95	95	95	95
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	95	95	95	95
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	80	80	80	80
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	10	10	10	10
		Persentase	100		Persentase	100	100	100	100	100

		Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu			Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu					
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100

		n			n					
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100

D. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Agama Maumere telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 berdasarkan SK.Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor :W23-A9/ 112 /KP.00.3/1/SK/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 3. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

NO	TUJUAN		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya proses peradilan	a. Persentase perkara yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara tahunlalu dibagi jumlah sisa perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan

	yang pasti, transparan dan akuntabel		yang harus diselesaikan dikali seratus persen		Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang ada dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	Sisa perkara tahun lalu dibagi sisa perkara tahun sebelumnya dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • PK	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan perkara dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Indeks kepuasan pencari keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dibagi jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dibagi jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum dikali seratus	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	persen Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website dibagi jumlah putusan perkara dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara prodeo dikali seratus persen	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dibagi jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan dikali seratus persen	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum.	Jumlah perkara volunter identitas hukum yang diselesaikan dibagi jumlah perkara Volunter identitas hukum yang diajukan dikali seratus persen	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dibagi jumlah pencari keadilan golongan tertentu dikali seratus persen	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
4	Meningkatnya Kepautahan Terhadap	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi).	Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dibagi jumlah	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

	Putusan Pengadilan		putusan perkara yang sudah BHT dikali seratus persen		
--	-----------------------	--	--	--	--



BAB II

KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara adalah suatu laporan tentang keadaan perkara pada Pengadilan Agama Maumere yang diuraikan dengan meliputi sisa perkara tahun lalu, perkara yang masuk pada tahun berjalan yang dilengkapi dengan Jenis perkara, perkara yang putus ditahun berjalan, sisa perkara tahun berjalan, Pengelolaan Biaya Proses dan Keadaan Keuangan Perkarayang penyajiannya digambarkan baik dalam suatu narasi, statistik, maupun grafik.

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

Kondisi Perkara pada Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2020 :

- a. Sisa perkara tahun 2020 : 1 Perkara
- b. Perkara masuk tahun 2021 : 97 Perkara
- c. Perkara yang diputus tahun 2021 : 98 Perkara

Dengan rincian sebagai berikut :

- Perkara yang dicabut : 6 Perkara
- Perkara yang dikabulkan : 86 Perkara
- Perkara yang ditolak : 0 Perkara
- Perkara yang tidak diterima : 1 Perkara
- Perkara yang di gugurkan : 4 Perkara
- Perkara yang dicoret : 0 Perkara
- Perkara Perdamaian : 1 Perkara

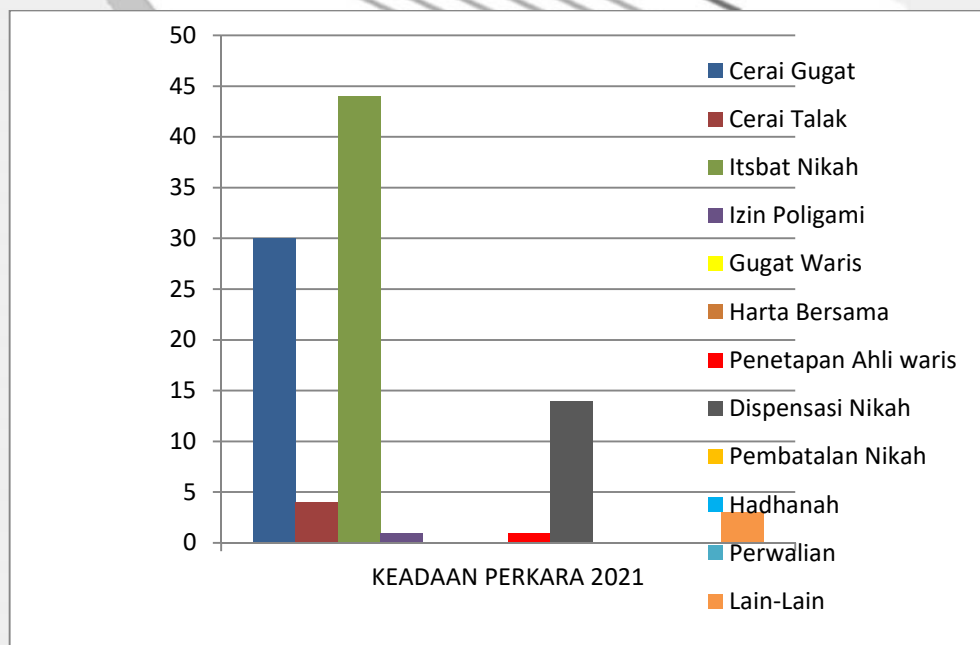
Perkara yang diterima Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2021, berjumlah 97 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel . 4. Jenis dan Jumlah Perkara PA. Maumere Tahun 2021

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	31	Perkara
2.	Cerai Talak	4	Perkara
3.	Itsbat Nikah	44	Perkara
4.	Izin Poligami	1	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	1	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	14	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara
10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	0	Perkara
12.	Lain-Lain	3	Perkara
JUMLAH		98	Perkara

Berikut Data grafiknya Perkara Tahun 2021

Grafik. 1. Jenis dan Jumlah perkara yang diterima PA. Maumere



d. Sisa Perkara tahun 2021 sebanyak 0 Perkara

Adapun rincian sisa perkara Tahun 2021 dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel . 5. Jenis dan Jumlah Sisa Perkara PA. Maumere Tahun 2021

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Jumlah
1	-	-	-
Jumlah Perkara			0 Perkara

e. Keadaan Keuangan Perkara Sisa Tahun 2021

Berdasarkan keadaan keuangan perkara dengan data dukung pada Aplikasi SIPP serta Aplikasi E-Keluangan Perkara, keadaan sisa keuangan perkara sampai pada tanggal 31 Desember 2021 dapat dilihat dalam rincian berikut :

Tabel . 6. Sisa uang Perkara PA. Maumere Tahun 2021

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Jumlah Sisa
1	37/Pdt.G/2021/PA.Mur.	Cerai Talak	320.000
Jumlah Perkara			320.000

f. Pengelolaan Biaya Proses

Pengelolaan biaya proses Tahun 2021 berdasarkan jumlah penerimaan perkara dan data base Komdanas biaya perkara dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel . 7. Penerimaan dan pengeluaran Biaya proses PA. Maumere Tahun 2021

No	Bulan	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa
1	Januari	3.001.000	1.415.000	1.586.000
2	Februari	5.820.000	2.016.500	3.803.500
3	Maret	4.635.000	4.127.500	507.500
4	April	1.380.000	792.000	588.000
5	Mei	2.550.000	1.427.000	1.123.000
6	Juni	950.000	620.000	330.000

7	Juli	1.172.500	699.000	473.500
8	Agustus	2.350.000	1.395.000	955.000
9	September	3.855.000	1.905.000	1.950.000
10	Oktober	2.115.000	1.265.000	850.000
11	November	1.765.000	662.500	1.102.500
12	Desember	515.000	195.000	320.000

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Keadaan perkara tingkat Banding merupakan keadaan perkara di Pengadilan Agama Maumere yang melakukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur;

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Maumere yang Mengajukan banding pada Tahun 2021 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

- Sisa perkara Banding tahun 2020 : 0 Perkara
- Perkara Banding masuk tahun 2021 : 0 Perkara
- Perkara Banding yang diputus tahun 2021 : 0 Perkara
- Sisa Perkara Banding tahun 2021 : 0 Perkara

Tabel . 8. Jenis dan Jumlah Perkara Banding PA. Maumere

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	0	Perkara
2.	Cerai Talak	0	Perkara
3.	Itsbat Nikah	0	Perkara
4.	Izin Poligami	0	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	0	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara
10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	0	Perkara

	JUMLAH	0	Perkara
--	--------	---	---------

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Keadaan perkara tingkat kasasi merupakan keadaan perkara di Pengadilan Agama Maumere yang melakukan upaya Kasasi di Mahkamah Agung;

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Maumere yang Mengajukan Kasasi pada Tahun 2021 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

- a. Sisa perkara Kasasi tahun 2020 : 0 Perkara
- b. Perkara Kasasi masuk tahun 2021 : 0 Perkara
- c. Perkara Kasasi yang diputus tahun 2021 : 0 Perkara
- d. Sisa Perkara Banding tahun 2021 : 0 Perkara

Tabel . 9. Jenis dan Jumlah PerkaraKasasi PA. Maumere

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	0	Perkara
2.	Cerai Talak	0	Perkara
3.	Itsbat Nikah	0	Perkara
4.	Izin Poligami	0	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	0	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara
10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	0	Perkara
	JUMLAH	0	Perkara

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)

Keadaan perkara tingkat Peninjauan Kembali (PK) merupakan keadaan perkara di Pengadilan Agama Maumere yang melakukan upaya Peninjauan

Kembali (PK) di Mahkamah Agung yang dengan adanya bukti-bukti baru yang diajukan yang memenuhi legal Standing pelaksanaan Peninjauan Kembali (PK).

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Maumere yang Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada Tahun 2021 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

- a. Sisa perkara PK tahun 2020 : 0 Perkara
- b. Perkara PK masuk tahun 2021 : 0 Perkara
- c. Perkara PK yang diputus tahun 2021 : 0 Perkara
- d. Sisa Perkara PK tahun 2021 : 0 Perkara

Tabel .10. Jenis dan Jumlah Perkara Kasasi PA. Maumere

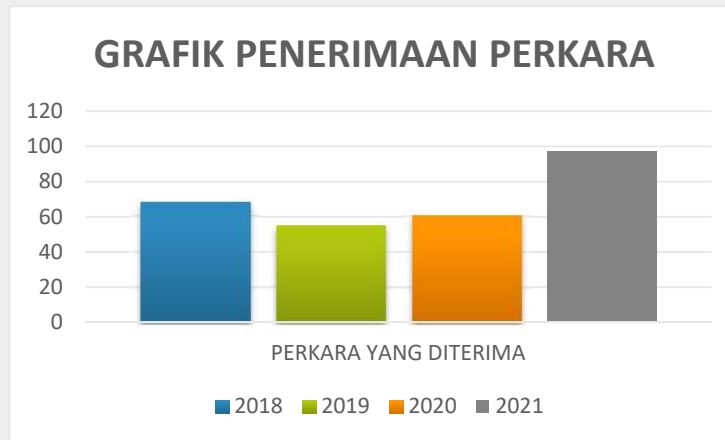
No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	0	Perkara
2.	Cerai Talak	0	Perkara
3.	Itsbat Nikah	0	Perkara
4.	Izin Poligami	0	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	0	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara
10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	0	Perkara
JUMLAH		0	Perkara

B. Penyelesaian Perkara

Keadaan penerimaan perkara pada Pengadilan Agama Maumere untuk tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2020. Adapun Untuk tahun 2018 jumlah perkara yang diterima adalah 65, pada tahun 2019 jumlah perkara yang diterima adalah 55, tahun 2020 jumlah perkara yang diterima adalah 61, sedangkan pada tahun 2021 perkara yang diterima adalah 97

perkara Berikut kami tampilkan grafik perkara yang diterima Pengadilan Agama Maumere dari tahun 2018 sampai dengan 2021:

Grafik 2 . Penerimaan Perkara PA. Maumere 3 Tahun terakhir



1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Kondisi jumlah sisa Perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2021 :

- Sisa perkara tahun 2020 : 1 Perkara
- Sisa Perkara yang diputus tahun 2021 : 1 Perkara

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel . 11. Jenis dan Jumlah Sisa perkara yang diputus Tahun 2021

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1.	Cerai Gugat	1 Perkara
2.	Cerai Talak	0 Perkara
3.	Itsbat Nikah	0 Perkara
4.	Izin Poligami	0 Perkara
5.	Gugat Waris	0 Perkara
6.	Harta Bersama	0 Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	0 Perkara
8.	Dispensasi Nikah	0 Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0 Perkara
10.	Hadhanah	0 Perkara
11.	Perwalian	0 Perkara

JUMLAH	1	Perkara
--------	---	---------

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Batas waktu penyelesaian perkara pada tingkat pertama mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014, dan pada Tahun 2021 Pengadilan Agama Maumere telah memutus Perkara sebanyak 98 perkara dengan rincian sisa perkara Tahun 2020 sebanyak 1 Perkara dan Perkara Yang diterima Tahun 2021 sebanyak 97 Perkara.

Tabel . 12. Jenis dan Jumlah Perkara yang dipurus tepat waktu Tahun 2021

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	31	Perkara
2.	Cerai Talak	4	Perkara
3.	Itsbat Nikah	44	Perkara
4.	Izin Poligami	1	Perkara
5.	Gugat Waris	-	Perkara
6.	Harta Bersama	-	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	1	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	14	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	-	Perkara
10.	Hadhanah	-	Perkara
11.	Perwalian	-	Perkara
12.	Lain-Lain	3	Perkara
	JUMLAH	98	Perkara

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2021 dalam prosentase adalah seperti tabel berikut ini :

Tabel . 13. Prosentase penyelesaian Perkara PA. Maumere

DITERIMA			PUTUS	DICABUT	DITOLAK	DICORET	GUGUR	Tidak Dapat Diterima	Perdamai an	SISA	PROSENTASE PENYELESAIAN
TH. 2021	SISA 2020	JUMLAH									
97	1	98	86	6	0	0	4	1	1	0	100 %

Grafik 3. Prosentase penyelesaian Perkara P.A. Maumere



Jumlah perkara Gugatan yang putus selama Tahun 2021 adalah 36 perkara. Adapun Penyebab terjadinya perceraian tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Zina	:	-	Perkara
b. Mabuk	:	-	Perkara
c. Madat	:	1	Perkara
d. Judi	:	-	Perkara
e. Meninggalkan Salah Satu Pihak	:	2	Perkara
f. Dihukum Penjara	:	-	Perkara
g. Poligami	:	-	Perkara
h. KDRT	:	-	Perkara
i. Cacat Badan	:	-	Perkara
j. Perselisihan Terus Menerus	:	28	Perkara
k. Kawin Paksa	:	-	Perkara
l. Murtad	:	-	Perkara
m. Ekonomi	:	-	Perkara
n. Cabut	:	-	Perkara
o. Gugur	:	-	Perkara
Jumlah	:	36	Perkara

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)

Perkara Pada Pengadilan Agama Maumere yang putus sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 98 Perkara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel . 14. Perkara yang tidak mengajukan upaya Banding, kasasi, PK, PA. Maumere

No	Jenis Perkara Putus	Jumlah	
1	Kabul	86	Perkara
2	Gugur	4	Perkara
3	Tidak Dapat Diterima	1	Perkara
4	Cabut	6	Perkara
5.	Perdamaian	1	Perkara
Jumlah Perkara		98	Perkara

Dari seluruh perkara yang telah diputus tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK. Dengan kata lain semua perkara pada Pengadilan Agama Maumere sampai dengan Desember 2021 tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi maupun PK.

4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi

Mediasi pada Pengadilan Agama Maumere untuk tahun 2021 dapat dilihat dalam rincian tabel berikut :

Tabel . 15. Hasil Mediasi Perkara PA. Maumere

No	Hasil Mediasi	Jumlah	
1	Berhasil	3	Perkara
2	Tidak Berhasil	4	Perkara
3	Gagal	-	Perkara
4	Damai	-	Perkara
5	Masih Dalam Proses	-	Perkara
Jumlah Perkara		7	Perkara

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi Iso Pengadilan)

Pengadilan Agama Maumere adalah salah satu satuan kerja tingkat pertama yang telah melaksanakan program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang dulunya adalah SAPM, Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 3955/DJA/HM.00/11/2020 tanggal 30 November 2020 tentang hasil rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020, Pengadilan Agama Maumere kembali memperoleh *Predikat A Excellent*. Adapun Surat Keputusan Nomor W23-A9/528/OT.01.3/SK/09/2021 tanggal 08 S 2020 tentang Penunjukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Maumere tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut :

Tabel. 16. Susunan Tim APM Pengadilan Agama Maumere Tahun 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	4	5
1	Suratnah Bao, S.Ag, M.H. 19740301.200604.2.001	Ketua	Top Manajemen
2	Yusuf Bahrudin, S.H.I. 19810521.200904.1.007	Wakil Ketua	Ketua APM
3	Mustajib. S.H.I. 19631231.199203.1.043	Panitera	SekretarisAPM
4	Jufri Endo, S.H.I. 19710421.199603.1.002	Sekretaris	SekretarisAPM
5	Fauzy Arizona, S.Sy 19880626.201712.1.003	Hakim Pratama	Koordinator Asesor Internal
6	Ahmad Muliadi, S.Sy 19921102.201712.1.002	Hakim Pratama	Sekretaris/Anggota

8	Abdullah, S.H, M.H 19700608.200312.1.002	Panmud Hukum	Koordinator Survei Kepuasan Masyarakat
9	Sigit Apriluberta, S.H. 19820426 200604 1 004	Panmud Permohonan	Sekretaris
10	Hamzah Usman 19741102.201408.1.002	Jurusita	Anggota
11	Imam Prabowo, S.H. 19970616.202012.1.007	CPNS	Anggota
12	Muhammad Rizki, S.H. 19840816.201101.1.006	Kasubbag Perencana, TI dan Pelaporan	Koordinator Pengendali Dokumen Kontrol APM
13	Sigit Apriluberta, S.H. 19820426.200604.1.004	Panmud Permohonan	Sekretaris
14	Achmad Hanif, S.Kom 19850407.200805.1.001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
15	M. Atsil Husnirafi, S.Kom 19960924.202012.1.006	CPNS	Anggota

1. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) atau Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Maumere yang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT Cabang Maumere, sebagaimana yang tertuang dalam *Memorandum Of Understanding (MOU)* Nomor : W23-A9/168/OT.01.3/1/2021 tanggal 12 Januari 2021 dalam rangka pemerataan akan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu (*Justice For All*), maka disusunlah suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dengan pembiayaan oleh Negara.

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Maumere mendapatkan alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Jasa Layanan Bantuan Hukum sebesar Rp. 25.000.000,- dan telah merealisasikan pelaksanaan Pos Layanan Hukum /Posbakum dengan jumlah jam pelayanan sebanyak 300 jam layanan dengan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua puluh empat juta rupiah*) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 0 (Nihil). Dalam hal ini capaian pelaksanaan realisasi Pos Layanan Hukum/Posbakum sebesar 100%.

2. Sidang Keliling /Pelayanan Terpadu

Pelaksanaan Sidang Keliling dan Pelayanan Terpadu telah dilaksanakan di Tahun 2021 dengan jumlah 15 perkara dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|------------|
| a. Perkara Cerai Gugat sebanyak | 0 perkara |
| b. Perkara Cerai Talak sebanyak | 0 perkara |
| c. Perkara Isbat Nikah sebanyak | 34 perkara |
| d. Perkara putus sebanyak | 30 perkara |
| e. Perkara digugurkan sebanyak | 2 perkara |
| f. Perkara dicabut sebanyak | 2 Perkara |

Pada Tahun 2021 ini, sidang keliling dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dan pelayanan Terpadu dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, dengan rincian lokasinya sebagai berikut :

- Sidang keliling bertempat Darat Pantai, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, sebanyak 13 perkara.
- Sidang keliling Pelayanan Terpadu bertempat di Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sebanyak 21 perkara.

Gambar. 4.Foto Kegiatan Sidang Keliling Desa Darat Pantai, Kec. Talibura PA. Maumere



Gambar. 5. Foto Kegiatan Sidang Keliling Terpadu Kelurahan Wolomarang, Kec Alok Barat PA. Maumere



Gambar. 6. Foto Kegiatan Sidang Keliling Terpadu Kelurahan Wolomarang, Kec Alok Barat PA. Maumere



3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Perkara Prodeo merupakan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Maumere yang beban biaya perkaranya ditanggung oleh Negara, sesuai alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2021, yang syarat untuk mendapatkan layanan prodeo dari Pengadilan Agama Maumere dengan melampirkan Surat Permohonan berperkara secara Prodeo, Fc. Kartu Tanda Penduduk/Domisili dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)/ Kartu Indonesia

Sehat maupun kartu lainnya yang menyatakan warga miskin sebagaimana amanah dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014.

Untuk Tahun 2021 jumlah perkara prodeo yang diterima oleh Pengadilan Agama Maumere adalah sebanyak 17 perkara dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|------------|
| a. Perkara Cerai Talak sebanyak | 0 perkara |
| b. Perkara Cerai Gugat sebanyak | 0 perkara |
| c. Perkara Isbat Nikah sebanyak | 0 perkara |
| d. Perkara putus sebanyak | 0 perkara |
| e. Perkara digugurkan sebanyak | 0 perkara |
| f. Sisa | 0 perkara. |



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kepangkatan, Golongan, dan Pendidikan

Gambar 7. Foto SDM aparatur PA. Maumere



Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting, dimana Aparatur Peradilan sebagai SDM memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka

mencapai tujuan *Good Government*. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Aparatur Peradilan Agama) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang peradilan. Sehingga SDM yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai salah satu pendukung manajemen SDM yang lebih baik, mekanisme pembinaan karir disempurnakan dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia dalam menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusi. Sejalan dengan arahan Reformasi Birokrasi, Pengadilan Agama Maumere telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi.

Dalam memperoleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, terintegrasi dan profesional, Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan Pembinaan internal untuk pegawai Pengadilan Agama Maumere dengan dilaksanakan apel pagi setiap hari Senin dan apel sore setiap hari Jum'at,

rapat bulanan secara berkala juga mengikutsertakan pegawai pada kegiatan-kegiatan Diklat, Sosialisasi, Pelatihan/Bimbingan Teknis Yustisial maupun Tata kelola keuangan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) itu sendiri. Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tersebut semakin lebih ditingkatkan khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur maupun dalam peningkatan pelayanan bagi para pencari keadilan seperti Implementasi Pelayanan PTSP dengan prinsip 5 S (Senyum, Salam, Sopan, Santun, Sapa) dan 5 (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) serta indah dan nyaman, maupun sosialisasi implementasi 13 (tiga belas) aplikasi unggulan Badan Peradilan Agama yang kegiatannya diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere secara berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Maumere dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Maumere.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pengadilan Agama Maumere per 31 Desember 2021 adalah 13 Pegawai, lebih rinci keadaannya dapat dilihat dari paparan tabel sebagai berikut :

Tabel. 17. Bagan nama –nama Pegawai Pengadilan Agama Maumere

No	Nama	Jabatan	Pangkat/ Gol. Ruang
1	Suratnah Bao, S.Ag., M.H	Ketua	Pembina, IV/a
2	Baharudin Yusuf, S.H.I	Wakil Ketua	Pembina, III/d
3	Fauzy Arizona, S.Sy.	Hakim Pratama	Penata muda, III/a
4	Ahmad Muliadi, S.Sy.	Hakim Pratama	Penata muda, III/a
5	Mustajib, S.H.I.	Panitera	Penata Tk. I, III/d
6	Jufri Endo, S.H.I.	Sekretaris	Penata, III/d

7	Abdullah, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Penata Tk. I, III/d
8	Mohammad Rizky, S.H	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata, III/c
9	Sigit Apriluberta, S.H.	Panmud Permohonan	Penata Muda, Tk.I, III/b
10	Achmad Hanif, S.Kom	Kasubag Umum Dan Keuangan	Penata, III/c
11	Hamzah Usman	Jurusita	Pengatur Muda Tk.I, II/b
12	Imam Prabowo, SH	CPNS	
13	M. A . Husnirafi, S.Kom	CPNS	

Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Maumere berdasarkan penggolongan Yudisial adalah sebagai berikut :

- **Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial**

Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Maumere terdiri dari :

a. 4 orang Hakim, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) 1 Orang Ketua
- 2) 1 Orang Wakil Ketua
- 3) 2 Orang Hakim

b. 3 Orang Panitera/Panitera Muda dan Panitera Pengganti, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) 1 Orang Panitera
- 2) 1 Orang Panitera Muda Hukum
- 3) 1 Orang Panitera Muda Permohonan

c. 1 Orang Jurusita.

- **Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial**

Sumber daya manusia Non Teknis Yudisial Pengadilan Agama Maumere tahun 2021 terdiri dari:

- a. 1 Orang Sekretaris ;
- b. 1 Orang Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- c. Kasubag Umum & Keuangan (Mengalami kekosongan jabatan)
- d. Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana (Mengalami Kekosongan Jabatan)
- e. 1 orang Bendahara di Perbantuan (merangkap jabatan Jusurita)
- f. 2 orang CPNS
- g. Semua kelompok jabatan fungsional Kesekretariatan (Bendaharawan, Pranata Komputer, Arsiparis, dan Pustakawan) masih mengalami kekosongan sejak Tanggal 28 Desember 2015 sampai saat ini;

Dalam menjalankan pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama Maumere disamping Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis dan Non Teknis Yudisial, juga dibantu dengan tenaga kontrak yang sumber pembiayaannya berasal dari Daftar Isian Pengelolaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2021 yang berjumlah 6 orang yang terdiri dari :

- b. Pegawai Honorer/Pramubhakti 3 orang;
- c. Pegawai Honorer/Pengamanan Sidang 1 orang; dan
- d. Pegawai Honorer/Sopir 2 orang.

yang diperbantukan 2 orang di bidang Kesekretariatan dan 3 orang di bidang Kepaniteraan.

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Honorer/Pramubhakti lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel . 18. Daftar Nama Tenaga Honorer/Pramubhakti PA. Maumere

No	Nama	Tahun Masuk/ Pendidikan	Jabatan Tugas	Tugas Tambahan	Jumlah
1	Saudah Yahya, S.H.I.	2001 S.1	Pramubhakti	Staf Umum (Operator Aplikasi Surat dan Petugas	1

				Kearsipan Bidang Kesekretariatan)	
2	M. Ikram Muslimin, S.E.	2012 Tahun, S.1	Pramubhakti	Staf Kepaniteraan (Admin SIPP)	1
3	Nasarudin U Mau	2014 SMA	Satpam	Pengamanan Kantor dan Pengamanan Sidang	1
4	Ika Asti Hana, S.E.	2015, S.1	Pramubhakti	Staf Kepaniteraan Penulis Register dan Buku Induk Keuangan	1
5	Muhammad Fauzi Lanjar	2016 SMA	Sopir	Staf Kepegawaian (Operator SIKEP MARI dan ABS Badilag)	1
6	Mohamad Al- Amin	2018, SMA	Sopir	Staf Kesekretariatan	1
JUMLAH					6

- Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang;
Keadaan pegawai Pengadilan Agama Maumere menurut jenjang pangkat/golongan ruang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel . 19. Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pangkat/Golongan ruang

No	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah
1	Pembina	IV/a	1 Orang
2	Penata Tk. I	III/d	4 Orang
3	Penata	III/c	3 Orang
4	Penata Muda Tk. I	III/b	0 Orang
5	Penata Muda	III/a	4 Orang

6	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1 Orang
---	---------------------	------	---------

- Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan jenjang pendidikan;

Keadaan pegawai Pengadilan Agama Maumere menurut jenjang pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel . 20. Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S. 2	2 Orang
2	S. 1	10 Orang
3	D III	0 Orang
4	SMA / Madrasah Aliyah	1 Orang

- Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan jenis Kelamin;

Keadaan pegawai Pengadilan Agama Maumere menurut jenjang jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel . 21. Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	12 Orang
2	Perempuan	1 Orang

- Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Usia;

Keadaan pegawai Pengadilan Agama Maumere menurut jenjang Usia dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel . 22. Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Usia

No	Usia	Jumlah
1	22 s.d. 29	4 Orang
2	30 s.d. 39	3 Orang
3	40 s.d. 49	4 Orang
4	50 s.d. 59	2 Orang

5

60 s.d. 66

0 Orang

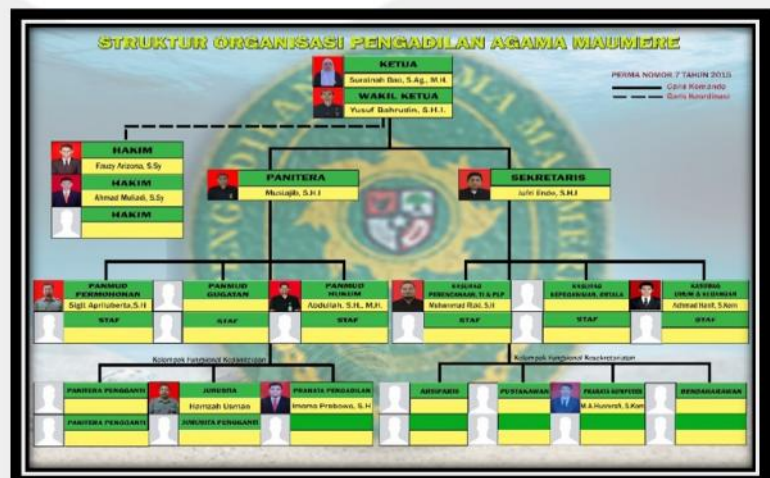
❖ Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere telah mempedomani Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua sebagai Pimpinan yang membawahi para Hakim sebagai pejabat fungsional dalam mengadili dan memutus perkara yang diajukan, dan selanjutnya ada 2 (dua) yaitu bidang pertama yaitu Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera yang membawahi Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum serta Jabatan Fungsional kepaniteraan yaitu Panitera Pengganti, Jurusita/jurusita Pengganti dan Pranata Peradilan. Kemudian bidang kedua yaitu Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubag Kepegawaian dan Ortala, Kasubag Umum dan Keuangan, serta Jabatan fungsional Kesekretariatan yaitu Fungsional Bendahara, Pranata Komputer, Arsiparis, dan Pustakawan.

Secara umum stuktur organisasi Pengadilan Agama Maumere menggambarkan suatu susunan dan hubungan kerja baik secara komando maupun kordinasi tiap bagian yang pemisahannya berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere tahun 2021 sebagai berikut :

Gambar. 8. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere



Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama Maumere tersebut diatas, Pengadilan Agama Maumere membagi tugas para pejabat dilingkungan satuan kerja sebagai berikut:

1. Ketua

Ketua Pengadilan Agama Maumere (Suratnah Bao, S.Ag., M.H) mempunyai tugas pokok dan fungsi merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Maumere serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Direktur Jenderal badan Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua Pengadilan Agama Maumere (Suratnah Bao, S.Ag., M.H) menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Maumere sejak 18 Januari 2021 sampai dengan sekarang. Lebih rinci dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 23. Bagan nama Ketua Pengadilan Agama Maumere

No	Nama Pejabat	Jabatan	TMT Jabatan	Ket
1	Suratnah Bao, S.Ag., M.H	Ketua	18 Januari 2021 s.d. Sekarang	Aktif

2. Wakil Ketua

Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere (Baharudin Yusuf, S.H.I) mempunyai tugas dan fungsi mewakili Ketua Pengadilan Agama Maumere dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Maumere serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Direktur Jenderal badan Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Wakil Ketua (Baharudin Yusuf, S.H.I) Pengadilan Agama Maumere telah menjabat sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai sekarang. Dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 24. Bagan nama Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere

No	Nama Pejabat	Jabatan	TMT Jabatan	Ket
1	Baharudin Yusuf, S.H.I	Wakil	10 Agustus 2021 s.d. Sekarang	Aktif

3. Hakim

Hakim Pengadilan Agama Maumere mempunyai tugas dan fungsi untuk meneliti dan mencatat berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang (Hakim Tunggal), menyidangkan perkara, memuat putusan/penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere.

Hakim Pengadilan Agama Maumere dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 25. Bagan nama Hakim Pengadilan Agama Maumere

No	Nama	GOL.	TMT Hakim	Masa Kerja	Ket
1	Suratnah Bao, S.Ag., M.H	IV/a	29-07-2009	10 Tahun 05 Bulan	Aktif
2	Baharudin Yusuf, S.H.I	III/d	01-08-2009	12 Tahun 05 Bulan	Aktif
3	Fauzy Arizona, S.Sy	III/a	27-04-2020	1 Tahun 08 Bulan	Aktif
4	Ahmad Muliadi, S.Sy	III/a	27-04-2020	1 Tahun 08 Bulan	Aktif

4. Panitera

Panitera Pengadilan Agama Maumere (Mustajib, S.H.I) bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi kepaniteraan, administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya dilingkungan Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membawahi Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

5. Panitera Muda

a. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Maumere (Abdullah, S.H., M.H) bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkara, menyajikan statistik data perkara, menyusun/membuat laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan melakukan pengurusan administrasi, pemberian keterangan dan mengkoordinir, memasukkan data perkara, anonimasi perkara yang putus dan berkekuatan hukum tetap serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Maumere bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan, untuk Jabatan Panitera Muda Gugatan mengalami kekosongan Jabatan dari tanggal 01 Agustus Tahun 2020.

c. Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Maumere (Sigit Apriluberta, S.H) bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan.

6. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maumere mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, serta membuat berita acara sidang semua peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan perkara Majelis Hakim/Hakim tersebut, dan juga menyelesaikan administrasi persidangan. Secara realitas jabatan Panitera pengganti yang ada di Pengadilan Agama Maumere saat ini tidak ada. Untuk sementara Panitera Sidang/Panitera Pengganti di rangkap oleh Panitera (Mustajib, S.H.I), Panitera Muda Hukum (Abdullah, S.H., M.H) dan panitera Muda Permohonan(Sigit Apriluberta,S.H) keadaan panitera sidang/pengganti dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 26. Bagan nama Panitera/Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maumere

No	Nama	GOL.	TMT Panitera Pengganti	Masa Kerja	Ket
2	Mustajib, S.H.I	III/d	13-11-2020	00 Tahun 02 Bulan	Aktif
3	Abdullah, S.H., M.H.	III/d	04-01-2016	03 Tahun 11 Bulan	Aktif
4	Sigit Apriluberta, S.H.	III/c	01-08-2019	1 Tahun 04 Bulan	Aktif

7. Jurusita

Jurusita Pengadilan Agama Maumere (**Hamzah Usman**) mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan semua perintah yang berhubungan dengan tugas-tugas kejurusitaan antara lain Pemanggilan para pihak, menyampaikan Pengumuman, Teguran (Anmaning) melakukan penyitaan, dan membuat berita acara penyitaan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis/Hakim yang dikoordinir oleh Panitera.

8. Sekretaris (Jufri Endo, S.H.I)

Sekretaris Pengadilan Agama Maumere (**Jufri Endo, S.H.I**) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi kepada semua unsur di Pengadilan Agama Maumere serta membawahi Kepala Sub Bagian (Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan), (Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana), (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan), Jabatan Fungsional Kesekretariatan (Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan, dan Bendahara) dan Staf Kesekretariatan.

9. Kepala Sub Bagian**a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan**

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Maumere (**Mohammad Rizki, S.H**) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, statistik, pelaksanaan pemantauan evaluasi dan dokumentasi, serta Pelaporan.

b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Agama Maumere mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan Kepegawaian, Penataan organisasi dan Tata Laksana, untuk saat ini Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mengalami Kekosongan Jabatan.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Maumere (Achmad Hanif, S.Kom) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, pengarsipan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan serta pengelolaan keuangan, Untuk saat ini Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pada Pengadilan Agama Maumere mengalami kekosongan Jabatan

1. Mutasi

Mutasi yang merupakan salah satu hal yang selalu dilakukan untuk memenuhi hak-hak personal maupun demi kebutuhan organisasi, yang terkadang cenderung teraktualisasi sebagai *Reward* namun ada juga sebagai *Punishment*.Regulasi pengaturan mutasi baik Hakim, tenaga teknis Kepaniteraan dan Juga Tenaga Kesekretariatan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaharuan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan, dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Penggambaran secara lebih detail terdapat mutasi pegawai Pengadilan Agama Maumere dirincikan pada tabel sebagai berikut :

a. Mutasi Tempat Tugas

- 1) Pegawai yang mutasi masuk di Pengadilan Agama Maumere periode tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel . 27. Keadaan Pegawai yang mutasi masuk PA. Maumere

No	Nama	Jabatan		TMT	No. SK
		Lama	Baru		

1	Achmad Hanif, S.kom	Kasubag Umum dan Keuangan PA Ende	Kasubag Umum dan Keuangan PA Maumere	29 Januari 2021	79/SEK/Kp.I/S K/2021
2	Baharudin Yusuf, S.H.I	Hakim PA Ponorogo	Wakil Ketua PA Maumere	10 Agustus 2021	154/KMA/SK/VIII/2021

2) Pegawai yang mutasi keluar di Pengadilan Agama Maumere tahun 2021 tidak ada dan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel . 28. Keadaan Pegawai yang mutasi Keluar PA. Maumere

No	Nama	Jabatan		TMT	No. SK
		Lama	Baru		
1	Acep Sugiri, S.Ag., M.H	Ketua	Hakim	18/01/2021	10/KMA/SK/I/2021

➤ **Mutasi Kenaikan Pangkat/Golongan, yaitu :**

Pegawai Pengadilan Agama Maumere yang Kenaikan Pangkat periode tahun 2021 sebanyak 2 (dua) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel . 29. Keadaan Kenaikan Pangkat/Golongan pegawai PA. Maumere

No	Nama	Pangkat Gol. Ruang		TMT	No. SK
		Lama	Baru		
1	Sigit Apriluberta, S.H	Penata III/b	Penata III/c	01/04/2021	W23-A/776/KP.04.1/SK/V/2021
2	Achmad Hanif, S.Kom	Penata III/b	Penata III/c	01/04/2021	W23-A/776/KP.04.1/SK/V/2021

➤ **Mutasi Kenaikan Gaji Berkala (KGB)**

Untuk Periode Tahun 2021 tidak terdapat Pegawai Pengadilan Agama Maumere yang mengalami Kenaikan Gaji Berkala (KGB) .

Tabel . 30. Keadaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai PA. Maumere

No	Nama	TMT KGB		No. SK.	Tanggal
		Saat ini	YAD		Usul
1	Muhamad Rizky,S.H	01/01/2021	01/01/2023	W23- A9/853/KP.0 4.2/12/2020	01/01/2021
2	Jufri Endo, S.H.I	01/03/2021	01/03/2023	W23- A9/123/KP.0 4.2/1/2021	01/03/2021

2. Promosi

Pegawai Pengadilan Agama Maumere yang mendapatkan Promosi periode tahun 2021 sebanyak 1 (satu) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel . 31. Keadaan Promosi pegawai PA. Maumere

NO	NAMA	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Yusuf Bahrudin, S.H.I	Penata TK 1, III/d	Hakim PA Ponorogo	Wakil Ketua PA Maumere

3. Pensiun

Pegawai Pengadilan Agama Maumere yang mengalami masa pensiun periode tahun 2021 tidak ada.

Tabel . 32. Keadaan Pegawai pensiun PA. Maumere

No	Nama	Pangkat / gol.Ruang	Jabatan	TMT	Ket
1	2	3	4	5	
1	-	-	-	-	-

4. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis sumber daya manusia telah diikutsertakan dalam Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur atau lembaga pemerintah lainnya.

Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek yang telah diikuti oleh pegawai teknis maupun non teknis selama kurun waktu tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Diklat SDM Teknis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2021

Tabel . 33. Diklat SDM Teknis pegawai PA. Maumere

NO	N a m a	Nama Diklat/Bimtek	Lama/ Waktu Diklat/Bimtek	Penyelenggara
1	Suratnah Bao, S.Ag.,M.H	Pelatihan Sertikasi Hakim Mediator	8 Hari Media Zoom dan 10 hari balai diklat Mega Mendung	Balai Diklat Mahkamah Agung Republik Indonesia
2	Suratnah Bao, S.Ag.,M.H	Pelatihan Singkat Eksekusi Putusan Perdata	4 Hari Media Zoom dan 4 hari klasikal di Labuan Bajo	Balitbang Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia
3	Fauzy Arizona, S.Sy	Pelatihan Online Arsip Elektronik Angkatan I	4 hari/ media zoom	Balitbang Kumdil Ma dan Lembaga Arsip Nasional

b. Diklat SDM Non Teknis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2021

Tabel . 34. Diklat SDM Non Teknis pegawai PA. Maumere

NO	N a m a	Nama Diklat/Bimtek	Lama Diklat/Bimtek	Penyelenggara
1	Jufri Endo, S.H.I	Manajemen ASN Mahkamah Agung	1Minggu/Me dia Zoom	Mahkamah Agung
2	Jufri Endo, S.H.I	Coachhing untuk peradilan	1hari/Media Zoom	Pudiklat Menpin

3	Jufri Endo, S.H.I	Diklat Laporan Kinerja Lingkungan Mahkamah Agung	5 Hari/Media Zoom	Litbank
---	-------------------	--	----------------------	---------



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Pengadilan Agama Maumere pada Tahun Anggaran 2021 mengelola 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), untuk Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi dengan nomor DIPA : SP DIPA-005.01.2.402851/2021 tanggal 23 November 2020, memiliki Pagu Awal sebesar Rp. 2.792.680.000 (*Dua Miliar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah*). Sedangkan untuk Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan nomor DIPA : SP DIPA-005.04.2.402852/2021 tanggal 23 November 2020, memiliki Pagu Awal Sebesar Rp. 61.952.000 (*Enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu Rupiah*). Terjadi 7 kali revisi Anggaran untuk Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi dikarenakan pagu anggaran yang ada kurang atau berlebih, penyesuaian rencana kegiatan dan dana yang tersedia, dengan terakhir revisi pada tanggal 29 Desember 2021 dikarenakan pemutakhiran data POK. adapun Detail realisasi pagu per jenis belanja pada masing-masing unit organisasi adalah sebagai berikut :

1. Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi

a. Belanja Pegawai

Pagu belanja pegawai pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2021 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 1.760.433.000 (*Satu Milyar tujuh ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah*). Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang peruntukannya antara lain untuk gaji, tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak

termasuk dalam belanja pegawai. Selama satu tahun anggaran mengalami satu kali revisi, sampai dengan revisi terakhir pada tanggal 13 Oktober 2021 dikarenakan terdapat pagu lebih. Sehingga Pagu untuk belanja pegawai berkurang menjadi Rp.1.470.234.000,- (*Satu Milyar empat ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu Rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 35. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	1.760.433.000	1.458.332.000	99,19%	11.901.582

b. Belanja Barang

Pagu belanja barang pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp. 994.247.000 (*Sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah*). Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Selama satu tahun anggaran mengalami beberapa revisi, sampai dengan revisi ke-6 dan terakhir revisi pada tanggal 29 Desember 2021. Revisi tersebut adalah penambahan pagu anggaran dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung untuk tambahan belanja pakaian dinas, Sehingga Pagu untuk belanja barang bertambah menjadi Rp. 1.004.252.000,- (*satu milyar empat juta dua ratus lima puluh dua ribu Rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 36. Realisasi Anggaran Belanja Barang (dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Barang	1.004.252.000	985.678.059	97,66 %	23.573.941

c. Belanja Modal

Pagu belanja barang pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 37.500.000 (*tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah*). Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 37. Realisasi Anggaran Belanja Modal (dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Modal	37.500.000	37.500.000	100 %	0

Realisasi Anggaran untuk Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi, digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 38. Realisasi Anggaran Unit Organisasi (02) Badan Urusan Administrasi

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	1.470.270.000	1.458.332.418	99,19%	11.901.582
2	Belanja Barang	1.009.252.000	985.678.059	97,66 %	23.573.941
3	Belanja Modal	37.500.000	37.500.000	100 %	0
Total Realisasi		2.516.986.000	2.481.510.477	98,59 %	35.475.523

Grafik 4. Persentase Realisasi Anggaran Unit Organisasi (02) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2021



2. Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

a. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara

Pagu pembebasan biaya perkara untuk peningkatan manajemen peradilan pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2020 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 13.120.000,- (*Enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 39. Realisasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara (dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pembebasan Biaya Perkara	13.120.000	13.110.00	99,93 %	10.000

b. Biaya Penyelesaian Perkara Di Luar Gedung Pengadilan

Pagu biaya penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan untuk peningkatan manajemen peradilan pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2020 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 23.832.000,- (*dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 40. Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara di Luar Gedung Pengadilan (dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	BelanjaPenyelesaian Perkara Di Luar Gedung Pengadilan	23.832.000	23.797.000	99,99 %	35.000

c. Jasa Konsultasi Bantuan Hukum

Pagu jasa konsultasi bantuan hukum untuk peningkatan manajemen peradilan pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2020 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua puluh lima juta rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 41. Realisasi Anggaran Jasa Konsultasi Bantuan Hukum (dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	BelanjaJasa Konsultasi Bantuan Hukum	25.000.000	25.000.000	100 %	0

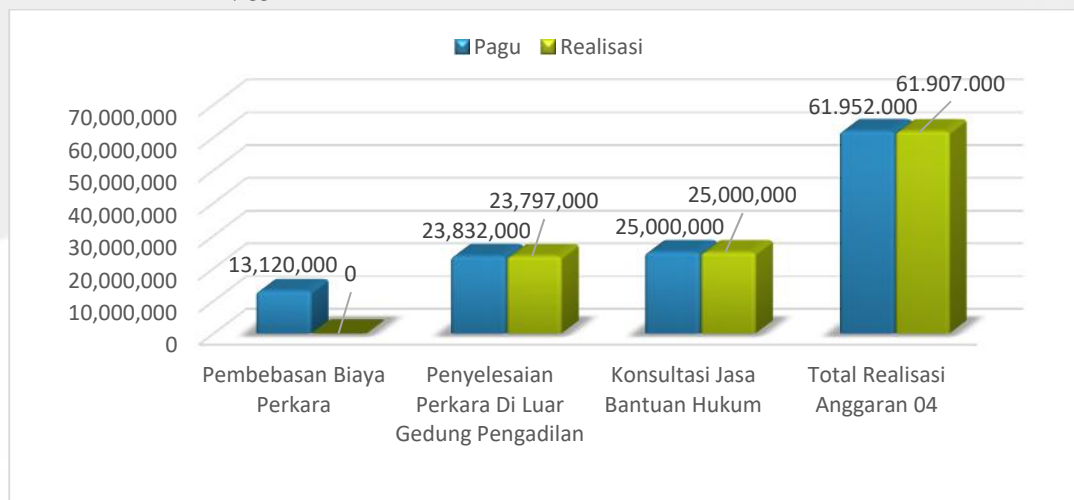
Realisasi Anggaran untuk Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 42. Realisasi Anggaran Unit Organisasi (04) Badan Peradilan Agama

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	

1	BelanjaPembebasan Biaya Perkara	13.120.000	13.110.00	99,56 %	10.000
2	BelanjaPenyelesaian Perkara Di Luar Gedung Pengadilan	23.832.000	23.797.000	99,98 %	35.000
3	Belanja Jasa Konsultasi Bantuan Hukum	25.000.000	25.000.000	100 %	0
Total Realisasi		61.952.000	61.907.000	99,93%	45.000

Grafik 5. Persentase Realisasi Anggaran Unit Organisasi (04) Badan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2021



B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana Kantor Pengadilan Agama Maumere sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik kepada para pencari keadilan. Mulai Tahun 2013, Pengadilan Agama Maumere telah menempati gedung Kantor baru yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kecamatan Alok Barat, Kelurahan Wolomarang, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Dengan ditempatinya gedung kantor baru ini, diharapkan pelayanan publik yang diberikan kepada para pencari keadilan dapat lebih optimal karena sarana dan prasarana yang ada sudah cukup menunjang. Sehingga tahun demi tahun kantor Pengadilan Agama Maumere terus berusaha untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan prima kepada para pencari keadilan walaupun masih jauh dari sempurna. Sarana dan prasarana yang dimiliki sampaidengan tahun 2019 sebagai berikut :

1. Matriks Sarana dan Prasarana Gedung

Gambar 9. Foto Sarana gedung PA. Maumere



Kantor Pengadilan Agama Maumere memiliki luas tanah keseluruhan 3.840 M², dengan luas bangunan kantor 500 m² x 2 lantai = 1.000 M² yang diresmikan pada 31 Januari 2017 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. Adapun

matriks sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel . 43. Sarana dan Prasarana Kantor PA. Maumere

NO	Uraian	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
9.	PA. MAUMERE				
I	Sarana / Prasarana Gedung				
1	Ruang Ketua	1	1	-	-
2	Ruang Wakil Ketua	1	1	-	-
3	Ruang Hakim	1	1	-	-
4	Ruang Panitera	1	1	-	-
5	Ruang Sekretaris	1	1	-	-
6	Ruang Sidang Utama	1	1	-	-
7	Ruang Sidang II	1	1	-	-
8	Ruang Kepaniteraan	1	1	-	-
9	Ruang Kesekretariatan	1	1	-	-
10	Ruang PP/JSP	1	1	-	-
11	Ruang Kasir	1	1	-	-
12	Ruang Bendahara	1	1	-	-
13	Ruang Posbakum	1	1	-	-
14	Ruang Server	1	1	-	-
15	Ruang Mediasi	1	1	-	-
16	Ruang PTSP	1	1	-	-
17	Ruang Rapat	1	1	-	-
18	Ruang Arsip Perkara	1	1	-	-
19	Ruang Arsip Umum	1	1	-	-
20	Ruang Perpustakaan	1	1	-	-
21	Ruang Tamu	1	1	-	-
22	Ruang Musholla	1	1	-	-

23	Ruang Laktasi dan Bermain Anak	1	1	-	-
24	Ruang Tunggu Sidang	1	1	-	-
25	Ruang Tunggu Mediasi	1	1	-	-
26	Ruang Tunggu PTSP	1	1	-	-
27	Pos Satuan Pengamanan	1	1	-	-
28	Ruang Gudang	1	1	-	-
II	Sarana /Prasarana Fasilitas				
1.	Lemari Besi	30	30	-	-
2.	Lemari Kayu	26	16	-	10
3.	Rak Besi	10	7	-	3
4.	Rak Kayu	13	10	-	3
5.	Filling Cabinet Besi	7	5	-	2
6.	Brankas	2	2	-	-
7.	Lemari Display	1	1	-	-
8.	Tabung Pemadam Api	2	2	-	-
9.	CCTV	1	1	-	-
10.	Papan Visual	19	10	-	9
11.	Alat Penghancur Kertas	1	1	-	-
12.	Mesin Absensi	2	1	-	1
13.	LCD Proyektor	1	1	-	-
14.	Teralis	1	1	-	-
15.	Meja Kerja Kayu	56	41	-	15
16.	Kursi Besi/ Metal	74	63	-	13
17.	Kursi Kayu	34	8	-	26
18.	Sice	7	4	-	3
19.	Bangku Panjang Kayu	5	2	-	3
20.	Meja Rapat	4	2	-	2
21.	Meja Komputer	7	4	-	3
22.	Meja Telepon	1	1	-	-
23.	Meja Resepsionis	1	1	-	-
24.	Kursi Fiberglass/Plastik	10	-	-	10
25.	Jam Elektronik	4	2	-	2
26.	AC Split	15	12	-	3
27.	Kipas Angin	7	3	-	4
28.	Kitchen Set	1	1	-	-
29.	Tandon Air	1	1	-	-
30.	Televisi	6	3	-	3
31.	Sound System	1	-	-	1
32.	Stabilisator	6	4	-	2
33.	Lambang Garuda Pancasila	3	3	-	-
34.	Tiang Bendera	5	2	-	3
35.	Kaca Hias	17	15	-	2

36.	Dispenser	5	4	-	1
37.	Mimbar/ Podium	4	4	-	-
38.	Palu Sidang	1	1	-	-
39.	Lambang Instansi	3	2	-	1
40.	HandyCam	1	1	-	-
41.	Karpet	1	1	-	-
42.	Gordyn/Kray	16	16	-	-
43.	UPS	5	4	-	1
44.	Camera Digital	1	1	-	-
45.	LCD Monitor	1	1	-	-
46.	PABX	1	1	-	-
47.	Pesawat Telepon	17	16	-	1
48.	Faksimile	1	-	-	1
49.	Scanner	2	2	-	-
50.	Genset	2	1	-	1
51.	PC Unit	23	18	-	5
52.	Laptop	17	13	-	4
53.	Printer	26	10	-	16
54.	Server	2	1	-	1
55.	Router	1	1	-	-
56.	Portable Hardisk	2	-	-	2
57.	Rak Server	1	1	-	-

Selain sarana dan prasarana yang ada saat ini di Pengadilan Agama Maumere yang terdaftar dalam Barang Milik Negara (BMN), di tahun 2021 Pengadilan Agama Maumere melakukan pengadaan Tambahan alat pengolah data pendung Pc All in untuk Kepaniteraan, serta mesin Fotocopy dengan status pinjam pakai dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel . 44.Sarana dan prasarana Kantor PA. Maumere

No	Uraian Jenis Barang/Alat	Tanggal/ Tahun Perolehan	Kondisi			Status Perolehan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	PC	11-06-2021				Pembelian Satker
2	Mesin Fotocopy	05-05-2021				Pinjam Pakai

2. Matriks Barang Milik Negara

a. Kendaraan Dinas

Sebagai sarana penunjang kerja serta untuk memperlancar operasional aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Maumere memiliki 7 buah kendaraan dinas yang dapat dilihat pada matriks berikut :

Tabel . 45.Matriks BMN PA. Maumere Tahun 2020

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Toyota Innova	2007	✓			
2	Suzuki APV Arena	2011	✓			
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Suzuki Satria RU 120	2000			✓	
2	Supra Fit NF 100 SL	2006	✓			
3	Karisma X 125 D NF 125 D	2006	✓			
4	Supra X 125 D NF 125 D	2005	✓			
5	Suzuki Thunder	2007	✓			

b. Rumah Dinas dan Mess Pegawai

Pengadilan Agama Maumere memiliki sebuah rumah dinas yang diperuntukan bagi Ketua PA, jenis bangunan Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen tahun perolehan 2010 yang beralamat di Jl. Wairklau No. 60, Madawat, Maumere. Sedangkan yang menjadi Mess Pegawai merupakan Gedung Kantor Lama Pengadilan Agama Maumere yang beralamat di Jl. Wairklau No. 56, Madawat Maumere. Alih fungsi gedung kantor lama ini didasarkan pada SK. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 740/SEK/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Alih Fungsi Pemanfaatan Tanah Dan/Atau Gedung Kantor Pengadilan Agama Maumere Yang Lama Menjadi Tanah Dan/Atau Bangunan Mess. Lengkapnya dapat dilihat pada matriks berikut :

Tabel . 46.Rumah dinas dan Mess pegawai PA. Maumere

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1	Rumah Dinas Ketua	1	✓			
II	Mess Pegawai					
1	Mess Pegawai	1	✓			

3. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

a. Pengadaan Sarana Pengadilan Agama Maumere

Untuk menunjang kinerja aparaturnya peradilan dan kelancaran dalam pelayanan kepada para pihak pencari keadilan pada tahun 2021, Pengadilan Agama Maumere mendapatkan alokasi belanja modal untuk Pengadaan Alat Pengolah Data Penunjang SIPP berupa dua (2) buah PC All in untuk Kepaniteraan dengan alokasi dana sebesar Rp. 37.500.000.

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Maumere yang disediakan dalam DIPA tahun Anggaran 2021 meliputi pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan sertamesin dengan rincian dan realisasi sebagai berikut:

Tabel . 47.Pemeliharaan Sarana dan prasarana Kantor PA. Maumere

No	Jenis Belanja Barang	Pagu Anggaran	Rincian Pemeliharaan	Realisasi Anggaran
1	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp. 156.500.000	Perawatan Gedung dan Halaman Kantor	Rp. 155.546.500
2	Pemeliharaan Peralatan dan	Rp. 2.400.000	- Genset	Rp. 2.400.000
		Rp. 7.000.000	- PC	Rp. 7.000.000

Mesin	Rp. 5.600.000	- Laptop	Rp. 5.600.000
	Rp. 14.320.000	- Roda 2	Rp. 14.320.000
	Rp.6.600.000	- Printer	Rp. 6.600.000
	Rp. 7.200.000	- AC	Rp. 7.200.000
	Rp. 50.662.000	- Roda 4	Rp. 50.441.000
	Rp.15.000.000	- BBM Roda 4	Rp. 15.000.000
		- Bahan Bakar	
	Rp. 2.400.000	Genset	Rp . 2.400.000

c. Alih Fungsi dan Penghapusan BMN

Pada Tahun 2021 Pengadilan Agama Maumere tidak terdapat alih fungsi dan Penghapusan Barang Milik Negara akan tetapi terdapat penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan bangunan kantor Pengadilan Agama Maumere berdasarkan Keputusan Menteri keuangan RI Nomor 349/KM.6/WKN.14/KNL.05/2021 tanggal 26 Juni Tahun 2021.

4. Administrasi Tata Persuratan

Selama tahun 2021 Pengadilan Agama Maumere telah mengelola surat masuk sebanyak 311 surat sedangkan surat keluar sebanyak 850 surat. Rekapitulasi surat masuk dan surat keluar sesuai dengan kode klasifikasi selama tahun 2020 sebagai berikut :

a. Surat Masuk

Tabel . 48. Surat Masuk PA. Maumere Tahun 2021

Bulan	KP	KU	PL	PP	PB	PS	OT	KS	HM	HK	Jumlah
Januari	1	-	1	1	-	2	2	-	5	-	12
Pebruari	15	1	-	1	-	-	7	-	8	6	38
Maret	2	-	-	-	-	-	1	-	5	7	15
April	3	1	-	1	-	-	2	-	1	2	10
Mei	2	1	-	-	-	-	2	-	7	2	12
Juni	5	-	-	1	-	2	3	-	7	3	21
Juli	7	-	1	-	-	-	7	-	3	-	16
Agustus	6	1	2	1	-	1	1	-	2	7	21
September	-	-	2	1	-	1	3	-	2	-	9

Oktober	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	5
Nopember	1	1	-	1	-	1	1	-	7	2	14
Desember	2	-	-	1	-	-	5	-	4	-	12
Jumlah											187

b. Surat Keluar

Tabel . 49.Surat Keluar PA. Maumere Tahun 2020

Bulan	KP	KU	PL	PP	PB	PS	OT	KS	HM	HK	Jumlah
Januari	138	12	1	-	-	-	2	-	2	20	175
Pebruari	18	8	1	1	-	2	5	-	7	15	57
Maret	54	11	3	1	-	-	8	-	5	11	93
April	8	9	2	-	-	-	3	-	9	4	35
Mei	8	13	-	-	-	-	3	-	-	6	30
Juni	12	10	4	-	-	-	6	-	2	4	38
Juli	10	7	3	-	-	-	3	-	3	5	31
Agustus	12	13	-	-	-	-	4	-	2	8	39
September	66	10	1	-	-	-	4	-	5	6	92
Oktober	15	18	1	1	-	1	3	-	3	5	47
Nopember	16	7	-	-	-	-	-	-	7	2	32
Desember	30	8	-	-	-	-	5	-	1	8	52
Jumlah											721

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

- Implementasi *E-Court* di Lingkungan Peradilan Agama

E-Court atau yang lebih akrab dengan istilah peradilan secara elektronik merupakan terobosan yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung dibidang administrasi pelayanan peradilan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) dengan berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pelayanan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman serta pelayanan administrasi peradilan yang cepat dan efisien.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sendiri mengatur mengenai pengguna, pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak yang semuanya dilakukan secara elektronik. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, pengguna yang dapat beracara menggunakan *e-Court* hanya pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah diverifikasi di Pengadilan Tinggi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pun belum mengatur mengenai persidangan secara elektronik. Maka dari itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dampak dari keluarnya peraturan terbaru tersebut, Mahkamah Agung melakukan terobosan baru dalam aplikasi *e-Court* dengan menambahkan menu *e-Litigation* (persidangan secara elektronik). Dengan penambahan fitur yang telah mencakup *e-Filing* (Pendaftaran perkara), *e-Payment* (pembayaran), dan *e-Summons* (Pemanggilan). Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, pengguna *e-Court* akan menjadi 2 (dua) kategori yaitu Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. Untuk Pengguna Lain, akun didapatkan melalui meja *e-Court* atau Pojok *e-Court* pada setiap pengadilan.

Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang dituntut untuk segera melaksanakan amanah dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Sebagai wujud nyata Pengadilan Agama Maumere telah melakukan suatu upaya Sosialisasi *E-Court* kepada para Pengacara/Advokat di Wilayah Kabupaten Sikka yang merupakan wilayah Yurisdiksi dari Pengadilan Agama Maumere, dan juga kepada Pejabat kepaniteraan serta Petugas PTSP Kepaniteraan. Selain pelaksanaan sosialisasi, Pengadilan Agama Maumere juga telah menyediakan sarana dan prasarana pendukung antara lain Pojok *E-Court* dan Penunjukan Petugas *E-Court* yang terintegrasi dengan pelayanan PTSP Pengadilan Agama Maumere sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua pengadilan Agama Maumere Nomor : W23-A9/ 735 /KP.00.3/SK/08/2019 tanggal 20 Agustus 2019, hal ini guna

mendukung implementasi pelayanan perkara secara *E-Court* yang maksimal demi mewujudkan dan meningkatkan kepuasan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Dalam kurun waktu tahun 2021 Pengadilan Agama Maumere telah menerima sebanyak 14 (empat belas) perkara melalui *E-Court* dan penerimaan perkara ini juga telah di laporkan kepada Badan Peradilan Agama secara berjenjang melalui Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

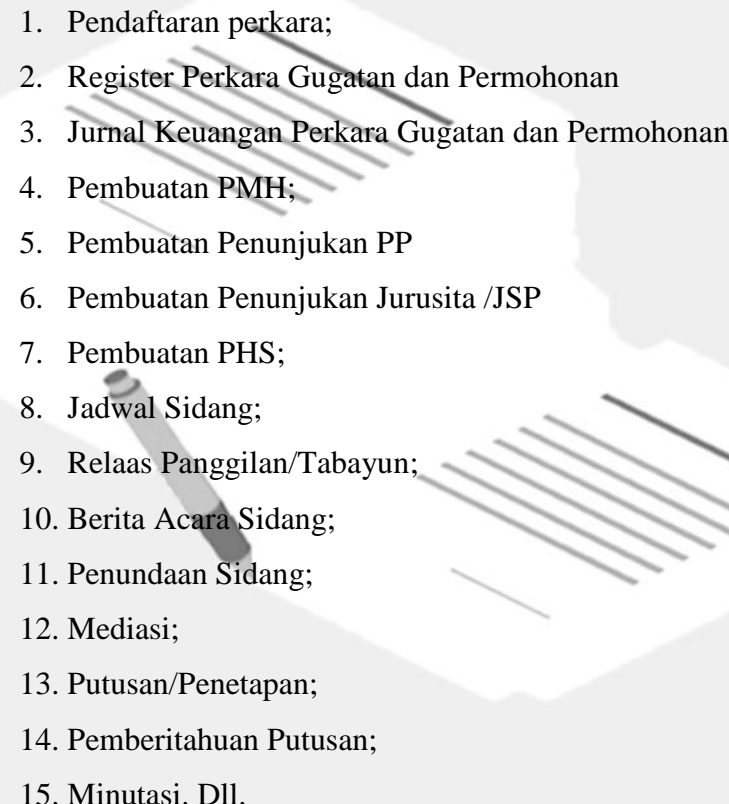
Gambar 10. Sarana dan prasarana pendukung E-Court PA. Maumere



- Implementasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Agama

Untuk menjamin pelaksanaan Administrasi Pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel. Mahkamah Agung menerapkan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi Pengadilan yang bersifat manual (konvensional) beralih ke administrasi pengadilan yang berbasis Teknologi Informasi. Pada era Globalisasi saat ini suatu Lembaga tanpa didukung Teknologi Informasi yang memadai tentu tidak akan berjalan dengan maksimal apalagi untuk Lembaga Peradilan dimana untuk memberikan pelayanan Informasi yang prima, transparan dan akuntabel kepada masyarakat pencari keadilan maka sarana dan prasarana tersebut sangat dibutuhkan. Begitu juga Sumber Daya Manusia yang ada harus terampil dalam mengoperasikannya. Salah satu aplikasi penunjang yang terintegrasi oleh Mahkamah Agung RI dalam pelaksanaan Teknologi Informasi adalah penerapan aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan Versi 4.1.1 yang pelaksanaan update terakhir di tahun 2021, hal ini menjadi media pendukung yang digunakan pada Pengadilan Agama

Pada tahun 2021 juga Pengadilan Agama Maumere menerima alokasi anggaran pengadaan alat pengolah data (PC) sebagai pendukung SIPP untuk Kepaniteraan yang telah di realisasikan sebagai pendukung optimalisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang digunakan dalam Pelayanan PTSP di Pengadilan Agama Maumere.



1. Pendaftaran perkara;
2. Register Perkara Gugatan dan Permohonan
3. Jurnal Keuangan Perkara Gugatan dan Permohonan
4. Pembuatan PMH;
5. Pembuatan Penunjukan PP
6. Pembuatan Penunjukan Jurusita /JSP
7. Pembuatan PHS;
8. Jadwal Sidang;
9. Relaas Panggilan/Tabayun;
10. Berita Acara Sidang;
11. Penundaan Sidang;
12. Mediasi;
13. Putusan/Penetapan;
14. Pemberitahuan Putusan;
15. Minutasi. Dll.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PERAKARA JAWA BARU GUNAWAN BUNCEK II

SPP BARABARAS BUNCEK II
SEMULIN ARIABAG
INSTRUKSI PENYUSUNAN BARABARAS BUNCEK II
SEKTOR DAN BERSAMAAN PERAKARA
PERAKARA JAWA BARU
GUNAWAN BUNCEK II
KALIAH: Integrasi teknologi informasi ke dalam sistem

Modul Informasi Penelusuran Perkara Berbasis Integrasi Teknologi Informasi

No. Urut
Nomor
Cari



No	Perkara	Daftar Perkara	Perkara	Perkara Perkawinan	Siskamhik	Perkara	Perkara Perkawinan
1	Perkara Sugesti	2	2	2	2	2	2
2	Perkara Perkawinan	2	2	2	2	2	2
3	Perkara Siskamhik	2	2	2	2	2	2
4	Perkara	2	2	2	2	2	2
5	Perkawinan	2	2	2	2	2	2

Adapun perangkat keras (*hardware*) yang dimiliki Pengadilan Agama Maumere sebagai pendukung optimalisasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) saat ini adalah :

1. Pc.8 unit;
2. Laptop 5 unit;
3. TV Monitor 2 unit;
4. Printer 5 unit;
5. Server 2 unit; dan
6. Perangkat jaringan 4 unit.

Berdasarkan hasil rapor penilaian penyelesaian perkara yang di rilis oleh Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI pertanggal 14 Desember 2021 Pengadilan Agama Maumere mendapatkan nilai capaian penyelesaian perkara sebesar 98,14%. Semoga dengan capaian ini tidak menurunkan semangat bagi seluruh aparaturnya terkait dalam mengoptimalkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), bahkan semoga menjadi spirit untuk dapat lebih meningkatkan kinerja sehingga mampu memberikan capaian penyelesaian perkara yang lebih baik lagi.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Gambar . 12. Sertifikat APM PA. Maumere



Salah satu bentuk inovasi Badan peradilan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pelaksanaan program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang dulunya adalah program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM).

Di pertengahan tahun 2021 Pengadilan Agama Maumere mengalami adanya masa transisi, karena adanya mutasi Hakim, dan penambahan Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Peradilan Agama maka berimplikasi pada susunan struktur Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

(APM) pada Pengadilan Agama Maumere, karena baik unsur Pimpinan maupun Hakim terjadi perubahan, sehingga perlu menetapkan kembali struktur baru Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor W23-A9/528/OT.01.3/SK/09/2021 tanggal 08 September 2021 dengan Susunan Sebagai berikut :

Tabel. 50. Susunan Tim APM Pengadilan Agama Maumere Tahun 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	4	5
1	Suratnah Bao, S.Ag, M.H. 19740301 200604 2 001	Ketua	Top Manajemen
2	Bahrudin Yusuf, S.H.I	Wakil Ketua	Ketua APM

	19810521 20090941 007		
3	Mustajib, S.H.I 196312311992031043	Panitera	Sekretaris Akreditasi
4	Jufri Endo, S.H.I 197104211996031002	Sekretaris	Sekretaris Akreditasi
5	Fauzy Arizona, S.Sy 198806262017121003	Hakim Pratama Madya	Koordinator Asesor Internal
6	Ahmad Muliadi.S.Sy 199211022017121002	Hakim Pratama Madya	Sekretaris
7	Muhammad Rizki 198408162011011006	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan	Koordinator Pengendali Dokumen APM
8	Sigit Apriluberta, S.H 198204262006041004	Panmud Permohonan	Sekretaris
9	Achmad Hanif, S.Kom 198504072008051001	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
10	M.Atsil Husnirafi, S.Kom	CPNS	Anggota
11	Abdullah, S.H., M.H 19700608.200312.1.002	Panmud Hukum	Koordinator Survey Kepuasan Masyarakat
12	Sigit Apriluberta, S.H 198204262006041004	Panmud Permohonan	Sekretaris
13	Hamzah Usman 197411022014081002	Jurusita	Anggota
14	Iman Prabowo, S.H 199706162020121007	CPNS	Anggota

Gambar 13. Foto Struktur Tim APM PA. Maumere Tahun 2021



Tantangan baru dari sebuah restorasi implemementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) tidak mengikat hanya pada kelengkapan dokumen serta sarana dan prasarana semata, tetapi hal yang menjadi mendasar adalah implementasi pelaksanaan tupoksi sesuai regulasi dan Standar Operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, khususnya pada wilayah Pelayanan masyarakat pencari keadilan dan pelaksanaan *Job Description* masing-masing aparatatur Pengadilan Agama Maumere.

Pengadilan Agama Maumere Juga telah melaksanakan *Asesmen Surveillance* ketiga Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang dilaksanakan pada tanggal 04 s.d. 05 September 2021, Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Nusa Tenggara Timur Nomor W23-A/1388/OT.01.3/9/2021 Tanggal 02 September 2021 perihal Pelaksanaan *Asesmen Surveillance* APM dengan menunjuk Tim *Asesmen Surveillance* eksternal Pengadilan Agama Maumere sebagai berikut :

Tabel. 51. Bagan nama Tim Asessor Eksternal Pengadilan Agama Maumere

No	Nama Asessor Eksternal	Pendamping
1	Nurhayati Leping Ama, S.Kom(Kasubbag Kepegawaian dan IT PTA. NTT)	Brian Rendra Graha, S.Sos (Panitera Pengganti PTA. NTT)

Dan setelah melewati beberapa tahapan baik pada saat *opening meeting*, pemeriksaan eviden maupun interview secara langsung pada masing-masing tupoksi stekholder mengenai implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di Pengadilan Agama Maumere maupun sampai tahap *closing meeting* dengan berjalan aman dan lancar, diakhir pelaksanan *Asesmen Surveillance* sekaligus dirangkaikan penyerahan Kontrak Kerja dari Ketua Tim *Asesmen Surveillance* kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere.

Gambar. 14. Foto Pelaksanaan

Kegiatan "Opening Meeting
Asesmen Surveillance
APM Pengadilan Agama Maumere
Tahun 2021"





Gambar 15. Foto Pelaksanaan Penyerahan Kontrak Kerja dari Ketua Tim Asesmen Surveillance kepada Ketua PA. Maumere



Gambar 16. Foto Bersama Tim Asesmen Surveillance bersama Keluarga besar PA. Maumere

Seluruh Aparatur Pengadilan Agama Maumere sangat berharap semoga hasil Asesmen Surveillance di Tahun 2021 dapat dicapai dengan sangat memuaskan, sehingga bias kembali mengukir prestasi dengan mendapatkan nilai predikat **“A” Excellent**, karena akan menjadi bukti komitmen dan kerja keras seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere.

Dalam mendukung pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang lebih optimal di Pengadilan Agama Maumere, aparatur Pengadilan Agama Maumere mewujudkan komitmen pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM), sebagaimana telah dilakukan Pencanangan Zona Integritas dan Penandatanganan Komitmen Bersama yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2018. Demi memenuhi konsistensi pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Agama Maumere telah berusaha dengan segala kemampuan memenuhi baik sarana dan prasarana sebagai pendukung terlaksananya implementasi Pembangunan Zona Integritas dari 6 (enam) area yang terdiri :

1. Manajemen Perubahan (Pola pikir)

Diwujudkan dengan Peningkatan pembinaan dan evaluasi secara berjenjang bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere baik yang

dilakukan saat pelaksanaan upacara/apel juga saat rapat berkara serta memaksimalkan fungsi dan peranan Role Model dan Agen Perubahan;

2. Penataan Tata Laksana;

Penataan Tata Laksana diwujudkan dengan optimalisasi pelaksanaan kinerja aparatur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan *Job Description* yang telah ditetapkan serta berusaha menempatkan sumber daya aparatur sesuai dengan disiplin ilmu yang miliki sehingga menciptakan korelasidalam mewujudkan capaian kinerja yang sesuai dengan rencana strategis dan Visi Misi Pengadilan Agama Maumere.

3. Peningkatan Kualitas SDM;

Peningkatan Kualitas SDM diwujudkan dengan mengikutsertakan aparatur dalam Diklat Penjenjangan seperti PIM IV yang telah diikuti oleh Sekretaris Pengadilan Agama Maumere dan Diklat Bendahara yang telah diikuti oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Maumere, serta meningkatkan kegiatan DDTK bidang kepaniteraan seperti SIPP, E-Court, 11 (sebelas) inovasi unggulan Dirjen Badilag serta E-Litigasi Mahkamah Agung, dan Bidang Kesekretariatan yaitu DDTK aplikasi Surat dan Aplikasi Notifikasi Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Pangkat. Peningkatan kualitas SDM ini diharapkan mampu membawa perubahan dalam peningkatan kualitas pelayanan baik secara internal maupun bagi masyarakat pencari keadilan.

4. Akuntabilitas Kinerja;

Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian yang menjadi tolak ukur dalam terwujudnya Pengadilan Agama Maumere yang transparan dan akuntabel, baik dalam pelayanan Informasi, Pengaduan juga terhadap akses media elektronik lainnya serta pelaksanaan laporan akuntabilitas kinerja, akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Maumere diwujudkan dengan tersedianya media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti Website yang selalu di update baik konten maupun berita, Banner-banner, brosur, majalah peradilan yang tersedia di ruang tunggu PTSP dan Ruang tunggu Sidang serta formulir permintaan informasi yang telah disediakan di meja PTSP pelayanan informasi, hal ini

sebagai implemementasi dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

5. Pengawasan; dan

Pengawasan diwujudkan dengan pelaksanaan Pengawasan Hakim Pengawasan Bidang (HAWASBID) secara berkala sesuai jadwal pelaksanaan yang ditetapkan, dan juga hasil pengawasan telah disampaikan kepada seluruh pejabat terkait dan telah tindaklanjuti semua dari hasil temuan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil tindaklanjuti Hakim pengawas Bidang (HAWASBID), hal ini menunjukkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi kinerja berjalan dengan baik.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Maumere adalah hal yang paling penting yang menjadi skala prioritas, dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Pengadilan Agama Maumere mewujudkan dengan meningkatkan fungsi dan peranan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penerimaan perkara secara elektronik (E-Court), 13 (tiga belas) Inovasi Dirjen Badilag, E-Litigasi, Pelayanan dan prodeo yang optimal dan sidang keliling bagi masyarakat kurang mampu serta Pos Layanan Hukum, dengan menerapkan prinsip pelayanan dengan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, sopan dan santun) dan 5 R (*Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin*) serta , program ini sangat memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat karena telah memberikan akses kemudahan berperkara di pengadilan Agama Maumere dengan asas Sederhana, cepat dan biaya ringan;

Dari implementasi pelaksanaan Zona Integritas Pengadilan Agama Maumere berdasarkan hasil Assesmen Surveillance dari Asessor Eksternal yang dilaksanakan pada Tanggal 19 Oktober 2020 dan sesuai dengan Lembar kerja Evaluasi (LKE), maka Pengadilan Agama Maumere mendapatkan predikat nilai A” Excellent. maka dengan hasil tersebut menjadi spirit dan motivasi bagi seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Maumere. Tim Asessor Internal juga secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi sehingga meminimalisir hal-hal menjadi kendala yang dapat

menghambat pelaksanaan zona integritas serta memberikan solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi, hal ini menjadi bukti komitmen yang sungguh-sungguh oleh seluruh aparaturnya tentang pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di pengadilan Agama Maumere diharapkan semoga selalu berjalan dengan baik dan terukur, sehingga menjadikan Pengadilan Agama Maumere menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM).

Gambar 17. Foto Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM



Gambar 18. Foto Piagam Pencanangan dan Komitmen Bersama Zona Integritas



- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Peradilan Agama, maka Ketua Pengadilan Agama Maumere tidak menunggu lama dan langsung mengambil langkah kongkrit dengan mengintruksikan Kepada Panitera

dan Sekretaris Pengadilan Agama Maumere untuk segera menindaklanjuti permintaan surat Dirjen Badan Peradilan Agama baik perencanaan maupun penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan Standar yang ditetapkan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, sehingga pada bulan Januari 2019 sarana dan Prasarana pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada pengadilan Agama Maumere telah selesai dibuat dan dapat digunakan untuk pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, walaupun dalam kenyataan masih belum secara optimal karena ada dua komponen pendukung yaitu Petugas Bank BRI Cabang Maumere dan petugas PT. POS Cabang Maumere belum dapat tersedia dalam pelayanan PTSP di Pengadilan Agama Maumere, sehingga masyarakat masih melakukan pembayaran dan Cap Pos secara manual di kantor Masing-masing. Belum tersediannya petugas Bank BRI dan petugas PT. POS dikarenakan masih menunggu kontrak Kerja yang sementara masih tahap kajian oleh masing-masing Pimpinan baik pihak Bank BRI Cabang Maumere maupun pihak PT. POS Cabang Maumere.

Namun dengan keterbatasan dan kekurangan komponen pendukung tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Petuags PTSP Pengadilan Agama Maumere kepada masyarakat pencari keadilan. Karena Pengadilan Agama Maumere selalu berupaya secara optimal mewujudkan pelayanan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sopan, Santun dan Sapa) dan 5 R (*Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin*) serta indah dan nyaman.

Gambar 19. Foto Sarana dan Petugas PTSP PA. Maumere



- **Inovasi Pelayanan Publik**

Sejak 11 (sebelas) aplikasi inovasi Badan Peradilan Agama di uji coba berdasarkan sebagaimana tertuang dalam surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1517/DJA/HM.00/4/2021 tanggal 22 April 2020, maka sejak saat itu seluruh Pengadilan Agama wajib melaksanakan 11 (sebelas) aplikasi inovasi Badilag tersebut dan pada tahun 2021 telah terjadi penambahan 2 (dua) inovasi aplikasi badilag yang mana menjadi 13 aplikasi unggulan Badilag yang terdiri dari:

a. Aplikasi Antrian sidang;

Fungsi aplikasi ini adalah menyediakan pendaftaran antrian secara online dan memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhannya;

b. Aplikasi Informasi Perkara dan Produk Pengadilan ;

Fungsi aplikasi ini adalah memberikan informasi terkait proses perkara kepada para pihak, yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak;

c. Aplikasi Notifikasi perkara

Fungsi aplikasi ini adalah memberikan notifikasi terkait status perkara kepada para pihak yang meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara;

d. Aplikasi *E-Kuangan*;

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai salah satu sarana validasi data keuangan perkara, pencetakan buku-buku keuangan dan saran pelaporan keuangan perkara.

e. Aplikasi *E-Register*;

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai salah satu sarana validasi data SIPP satuan kerja dan sebagai saran pencetakan buku-buku register sesuai pola bindalmin;

f. Command Center.

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai pusat kontrol data manajemen peradilan agama sehingga mampu mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi berupa pusat data dan ruangan khusus dengan berbagai peralatan khusus serta menjadi pusat pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara virtual dan realtime.

g. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan;

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin dan sebagai salah satu bukti bahwa seseorang masuk dalam daftar penduduk miskin berdasarkan basis data terpadu dari pemerintah;

h. Aplikasi PNPB fungsional;

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai pencatatan PNPB secara lengkap mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, juga sebagai sarana informasi jumlah perkara yang belum disetorkan PNPB fungsional ke kas Negara dalam tahun berjalan serta sebagai pengukuran kinerja Kasir dan Bendahara penerimaan.

i. Aplikasi *E-Laporan*;

Fungsi aplikasi ini adalah untuk kepatuhan pengiriman laporan bulanan secara online pada lembaga peradilan Agama.

j. Validasi Akta Cerai;

Fungsi Aplikasi ini adalah Sebagai sarana untuk memverifikasi keaslian Akte Cerai yang dipegang oleh para pencari keadilan.

k. Gugatan Mandiri;

Fungsi Aplikasi ini adalah Sebagai sarana untuk memudahkan para pencari keadilan dalam pembuatan gugatan secara mandiri.

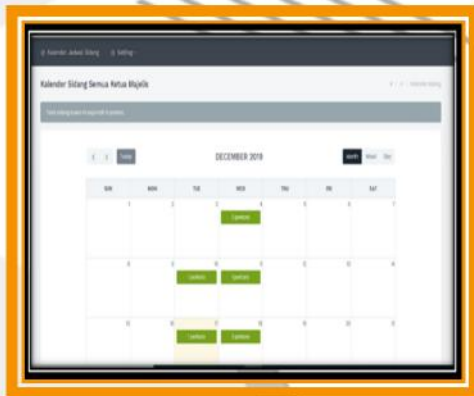
l. CCTV Online;

Fungsi Aplikasi ini adalah sebagai sarana kontrol kepatuhan pegawai dalam hal masuk kerja dan juga sebagai sarana control keamanan Online.

m. Vision Online;

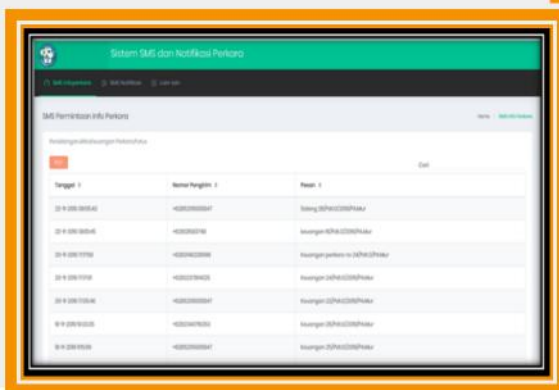
Fungsi Aplikasi ini adalah sebagai Pelayanan Perizinan Pegawai peradilan Agama secara online

Dari 13 (tiga belas) aplikasi inovasi Badilag tersebut seluruhnya telah di implementasikan di Pengadilan Agama Maumere, walaupun ada beberapa aplikasi yang masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut agar dapat lebih optimal implementasi aplikasi tersebut dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama Maumere telah melaporkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Pengadilan Tinggi Agama Kupang tentang implementasi 13 (tigabelas) aplikasi inovasi Badan Peradilan Agama.



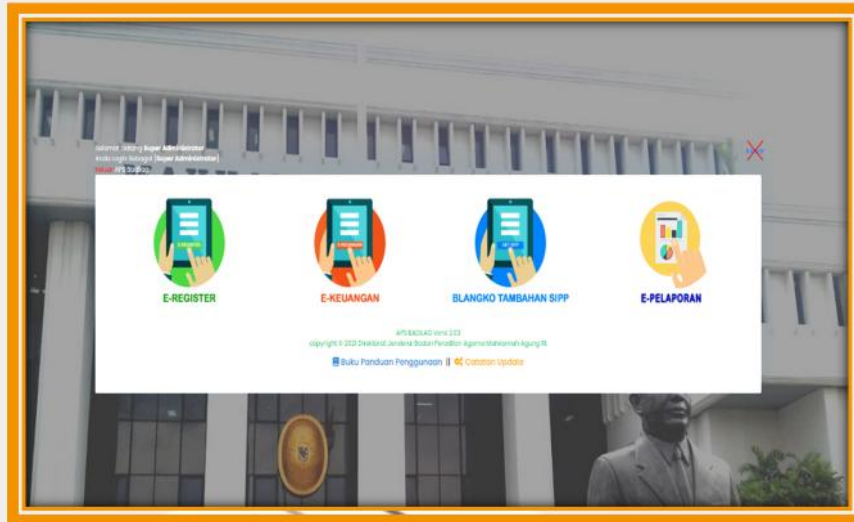
Gambar 20. Tampilan Aplikasi Antrian Sidang PA. Maumere

Gambar 21. Tampilan Aplikasi Informasi Produk Pengadilan PA. Maumere

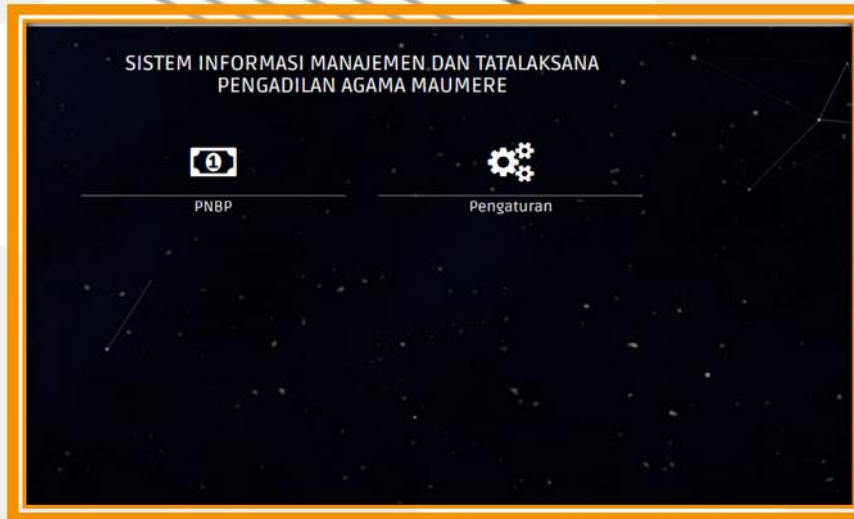


Gambar 22. Tampilan Aplikasi Notifikasi Perkara PA. Maumere

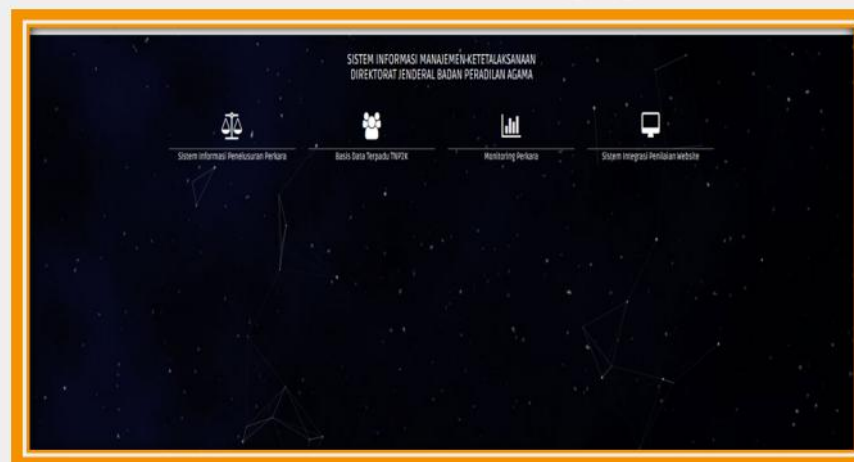
Gambar 23. Tampilan Aplikasi E-Register dan E-Keunagan PA. Maumere



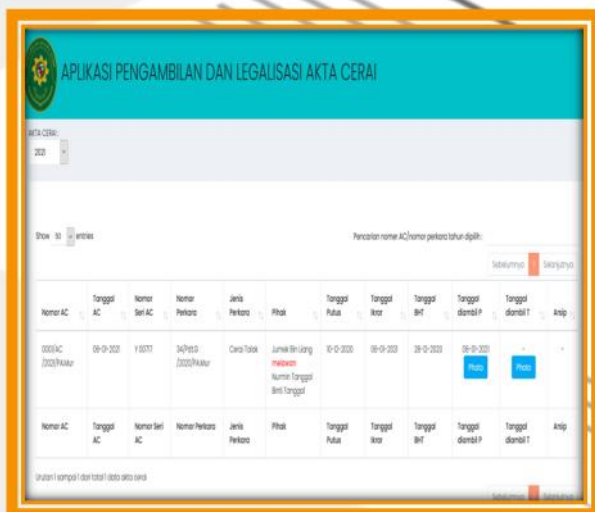
Gambar 24. Tampilan Aplikasi PNBP Fungsional PA. Maumere



Gambar 25. Tampilan Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan PA. Maumere



Gambar 26. Tampilan Aplikasi Command Center PA. Maumere



Gambar 27. Tampilan Aplikasi Validasi Akta Cerai PA. Maumere



Gambar 28. Tampilan Aplikasi Gugatan Mandiri PA. Maumere

CCTV Online PA. Maumere



~~Vision Online PA. Maumere~~



BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen dalam menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas pokok dan fungsi dapat dijalankan sesuai rencana strategis serta aturan yang berlaku. Dalam hal Pengawasan Pengadilan Agama Maumere telah berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, dan KMA Nomor: 145/KMA/SK/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007. Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan kegiatan dimaksud, dimana dalam pelaksanaan Pengawasan tersebut yang menjadi Koordinator Pengawas adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere, dengan mengkoordinir seluruh Hakim yang menjadi Pengawas Bidang.

Inti dari sebuah pengawasan adalah pengendalian dimana pengendalian tersebut juga terdiri dari 2 (dua) aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Sehingga pengawasan harus dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh agar mampu menciptakan organisasi yang baik dan berkesinambungan.

1. Pengawasan Melekat

Dalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan refresif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien. Pada Pengadilan Agama Maumere, pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere secara berkala mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari. Demikian juga pengawasan dilakukan melalui rapat-rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung, maka yang bertanggungjawab untuk mengawasi dan membina Hakim dan PNS dalam satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama adalah Ketua Pengadilan. Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal, Ketua Pengadilan Agama Maumere telah menunjuk Hakim pengawas

bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk melaksanakan pengawasan setiap triwulan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

Untuk lebih menguatkan peranan dan fungsi Pembinaan serta Pengawasan Bidang Ketua Pengadilan Agama Maumere telah membuat sebuah regulasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : W23-A9/213/KP.00.3/SK/2/2021 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Tahun 2021 tanggal 08 Februari 2021 yang susunannya sebagai berikut:

Tabel . 51. Susunan Tim Hawasbid PA. Maumere

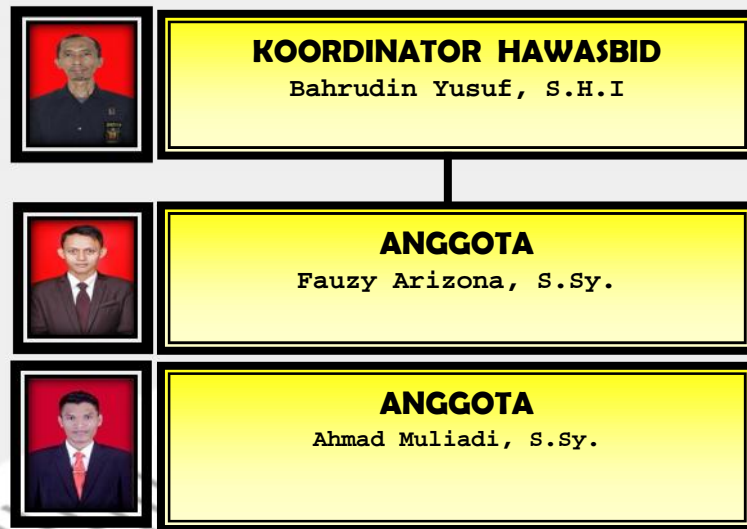
NO	NAMA, NIP PANGKAT, GOLONGAN	JABATAN		KET
		DINAS	HAKIM PENGAWAS BIDANG	
1.	Suratnah Bao, S.Ag., M.H. 19740301 200604 2 001 Pembina, IV/a	Ketua /Hakim MadyaPratama	➤ Penasehat/Koor dinator Pengawasan	
2.	Fauzy Arizona, S.Sy 19880626.201712.1.003 PenataMuda, III/a	Hakim Pratama	➤ Pengawas Bidang Kesekretariatan dan Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik	
3.	Ahmad Muliadi, S.Sy. 19921102.201712.1.002 PenataMuda, III/	Hakim Pratama Madya	➤ Pengawas Bidang Kepaniteraan (Administrasi persidangan, administrasi perkara, dan keungan perkara)	

Kemudian karena adanya promosi dan mutasi Hakim Pengadilan Agama Maumere sehingga perlu dilaksanakan pembaharuan Susunan ataupun komposisi Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Maumere Tahun 2021 sebagaimana dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor: W23-A9/537/KP.00.3/SK/9/2021 tanggal 08 September 2021 tentang Revisi Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Maumere Tahun 2021 yang susunannya adalah sebagai berikut :

Tabel . 52. Susunan Revisi Tim Hawasbid PA. Maumere

NO	NAMA, NIP PANGKAT, GOLONGAN	JABATAN	
		DINAS	HAKIM PENGAWAS BIDANG
1.	Bahrudin Yusuf, S.H.I 198105212009041007 Pratama Utama, III/d	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan
2.	Fauzy Arizona, S.Sy. 19880626.201712.1.003 PenataMuda, III/a	Hakim Pratama	Pengawas Bidang Kesekretariatan dan Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
3.	Ahmad Muliadi, S.Sy. 19921102.201712.1.002 PenataMuda, III/a	Hakim Pratama	Pengawas Bidang Kepaniteraan (Administrasi persidangan, administrasi perkara dan keuangan Perkara)

Tabel. 31. Bagan Tim Hawasbid PA. Maumere Tahun 2021



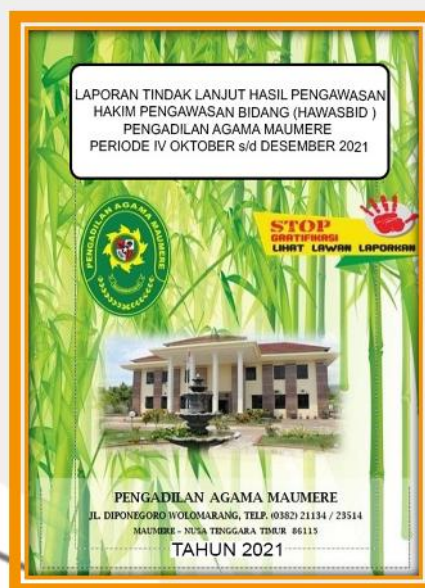
Pelaksanaan Pengawasan yang telah berjalan di Pengadilan Agama Maumere telah secara rutin/reguler sesuai dengan jadwal pengawasan yang berikan kepada masing-masing bidang.

Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dikoordinatori oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere yang hasilnya kemudian dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere sebagai penanggung jawab tugas-tugas yang dilaksanakan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Maumere dapat mempelajari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang untuk dijadikan bahan evaluasi kinerja Aparatur Peradilan yang dipimpinnya.

Adapun selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2021, pada Pengadilan Agama Maumere telah dilakukan Pengawasan dan Pembinaan oleh Hakim Pengawas Bidang selama 4 (empat) periode dan Hasil Pengawasan Hakim Pengawasan Bidang telah ditindaklanjuti seluruhnya pejabat terkait baik melalui laporan hasil tindak lanjut maupun dengan pelaksanaan yang membutuhkan *action* ataupun tindakan perubahan yang sifatnya segera semua telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta arahan dari Hakim Pengawas Bidang.



Gambar 32. Laporan Hasil Pengawasan Bidang



Gambar. 33. Laporan Tindak lanjut Hasil Pengawasan Bidang

2. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh pihak yang memahami substansi kerja objek yang diawasi dan ditunjuk khusus untuk melakukan audit independen terhadap objek yang diawasi, dalam hal ini pengawasan fungsional Pengadilan Agama Maumere dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Badan Pengawasan (Bawas) dari Mahkamah Agung RI selaku atasan langsung. Pemeriksaan dimaksud untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Agama Maumere dalam tertib administrasi, organisasi finansial Peradilan, terselenggaranya manajemen Peradilan yang baik dan benar serta memberikan pembinaan secara langsung. Pemeriksaan tersebut sangatlah berarti karena kinerja Pengadilan Agama Maumere bisa diukur dari hasil pemeriksaan tersebut dan hasilnya baik walaupun tentunya belum sempurna karena masih ada beberapa yang perlu adanya sedikit perbaikan dan pembaharuan, namun sebagai catatan diharapkan kedepan akan lebih disempurnakan sehingga mampu memenuhi target dan capaian yang

diinginkan sesuai dengan Rencana Strategis dan Program Kerja yang telah ditetapkan.

B. Evaluasi

Untuk melihat hasil kinerja apakah mengalami peningkatan ataupun penurunan maka dibutuhkan sebuah evaluasi yang progresif. Evaluasi hasil pengawasan dimaksudkan untuk melakukan tindakan perbaikan sistem manajemen maupun tata kelola serta pencegahan terhadap pelaksanaan kinerja yang tidak atau belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang secara periodik telah dilaksanakan dengan baik setiap triwulan (tiga bulan) sekali, hal ini disesuaikan dengan jadwal pembinaan dan pengawasan dari Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan (HATIBINWASDA) dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun. Hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Hawasbid yang merupakan temuan, menjadi bahan bagi Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere (sebagai koordinator pengawasan) untuk menindaklanjuti dan menuangkan dalam sebuah Laporan Hasil Pengawasan Bidang dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere serta tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang cq. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang (Koordinator HATIBINWASDA) sebagai bahan evaluasi, dan juga hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Masing-masing kepada Panitera dan Sekretaris selaku penanggungjawab masing-masing bagian. Untuk segera menindaklanjuti dan membenahi segala hal yang menjadi temuan dan menuangkannya dalam bentuk laporan Tindak lanjut Hasil Pengawasan Bidang, baik hal-hal yang menyangkut kepaniteraan maupun yang berkenaan dengan kesekretariatan.

Ada dua bidang evaluasi yang terkait yaitu :

b. Bidang Kepaniteraan (Administrasi Perkara)

- a. Evaluasi bidang Kepaniteraan yaitu dengan mengadakan rapat rutin dengan para Hakim, dengan Panitera Pengganti, serta rapat dengan Jurusita;
- b. Mengadakan Rapat, Sosialisasi dan DDTK kepada Tim SIPP, Petugas PTSP dan *E-Court*;
- c. Mengadakan rapat minimal 1 bulan sekali dengan seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Maumere;

- d. Pengawasan dan pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
- c. Bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum)
 - a. Evaluasi bidang Kesekretariatan yaitu dengan mengadakan rapat-rapat dengan para Kasubag, petugas operator SIMAK BMN dan Operator SAKPA, Tim Teknologi Informasi, dan Pengelola Website;
 - b. Mengadakan rapat minimal 1 bulan sekali dengan seluruh aparat Pengadil Agama Maumere;
 - c. Pengawasan dan pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

Pengadilan Agama Maumere telah mengadakan upaya Evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Maumere perihal diterbitkannya implementasi dari terbitnya Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, yang dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa kewajiban Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas Pengawasan dengan memberikan arahan dan pembinaan agar seluruh aparat dalam tempat kerjanya tersebut tetap memiliki integritas disiplin kerja, mengindahkan kode etik baik hakim/PNS dan mempedomani perilaku yang baik, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan.
2. Peningkatan kedisiplinan aparat Pengadilan Agama Maumere baik dalam hal disiplin Absensi jam masuk, Istrahat dan Pulang maupun disiplin pelaksanaan hasil kinerja;
3. Mengadakan assessmen internal sebagai upaya perbaikan terus-menerus terhadap terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dan tertibnya implementasi administrasi baik di bidang kepaniteraan maupun kesekretariatan.
4. Mengadakan sosialisasi hasil rapat pembinaan, rapat kerja daerah dan rapat kerja nasional baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. Hakim Pengawas bidang yang telah di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maumere telah melakukan pemeriksaan secara komperhensif tentang tugas pokok dilingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- b. Setelah melakukan pemeriksaan masing-masing hakim pengawas bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.
- c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere untuk dievaluasi;
- d. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan Hakim Pengawas Bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada Panitera dan Sekretaris agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dalam jajarannya dengan skala prioritas.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Maumere telah berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada, walaupun secara realitas masih sangat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi baik dalam memenuhi pelayanan secara internal maupun pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan;
2. Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan Zona Integritas diharapkan dapat mewujudkan Pengadilan Agama Maumere menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBBK) dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM), sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, dan juga dengan harapan Pengadilan Agama Maumere mendapatkan kenaikan kelas dari Kelas II menjadi kelas 1 B.
3. Penyelesaian perkara tahun 2021 pada tingkat pertama telah diusahakan secara maksimal. Dari sisa tahun 2020 sebanyak 1 perkara, ditambah perkara yang diterima pada tahun 2021 sebanyak 97 perkara, telah berhasil diselesaikan sebanyak 98 perkara sehingga sisa perkara tahun 2021 sebanyak 0 perkara. Sedangkan terdapat kenaikan penerimaan perkara pada tahun 2021 yaitu sebanyak 97 dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 61, sehingga jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahun 2021 mengalami kenaikan;
4. Dengan Implementasinya E-Letigasi Mahkamah Agung dan 13 (tiga belas) aplikasi Inovasi Badan Peradilan Agama, sangat memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Maumere, khususnya dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, karena baik lembaga hukum maupun masyarakat sangat merasa terbantu dengan

hadirnya pembaharuan peradilan yang berbasis teknologi informasi sesuai dengan asas beracara di Pengadilan yaitu Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

5. Pagu Anggaran belanja Kantor Pengadilan Agama Maumere (402851) Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2021 setelah mengalami revisi-7 kali sebesar Rp. 2.516.986.000 (*Dua Miliar enam Ratus lima puluh Juta Delapan Ratus Sembilan belas Ribu Rupiah*) sedangkan anggaran yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 2.481.510.477 (*Dua miliar enam ratus dua juta seratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) atau sebesar 98,59%. Terdapat sisa anggaran pada belanja gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp. 11.901.582 (*empat juta lima puluh ribu enam puluh satu rupiah*), belanja barang sebesar Rp. 23.573.941 (*empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah*) sedangkan pada anggaran belanja modal dapat terserap 100%.
6. Pagu Anggaran belanja kantor Pengadilan Agama Maumere (402852) Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2021 sebesar Rp. 61.952.000,- (*Enam puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 61.907.000,- (*Enam puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*) atau sebesar 99,93 % dan terdapat sisa anggaran Rp 45.000 (*empat puluh lima ribu rupiah*).
7. Dengan adanya alokasi anggaran Prodeo, Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu dan Posbakum sangat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, karena masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan hukum dan pelayanan perkara dengan secara cuma-cuma atau gratis kepada masyarakat. Khususnya masyarakat yang berada dikepulauan dan daerah terpencil seperti Desa darat pantai telah dilakukan sidang keliling 1 kali, Sidang Keliling Terpadu di Kelurahan Wolomarang di tahun 2021 oleh Pengadilan Agama Maumere dalam sidang itsbat nikah.
8. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas Peradilan selain dukungan sarana dan prasarana yang telah dijabarkan diatas, juga sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang memadai untuk meningkatkan kinerja aparatur pegawai Pengadilan Agama Maumere maupun pelaksanaan pelayanan

bagi masyarakat pencari keadilan karena dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Agama Maumere saat ini berdampak kepada adanya Pegawai yang merangkap Jabatan/pekerjaan pada bidang Kesekretariatan maupun pada bidang Kepaniteraan, hal ini tidak lain untuk memenuhi optimalisasi fungsi peradilan agar berjalan dengan baik dan lancar terlebih pada peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan;

9. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yudisial maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif karena adanya respon timbal balik sebagai wujud tindak lanjut dari hasil pengawasan bidang;
10. Pelaksanaan implementasi Teknologi Informasi dan transparansi peradilan sudah berjalan dengan baik dengan didukung website Pengadilan 1 Maumere yaitu *pa.maumere.go.id* yang selalu terupdate, aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan menggunakan versi terbaru 4.0.1, Komdanas, Sikep MARI, dan Aplikasi Backup Sikep (ABS), Direktori Putusan serta sistem Informasi Perkara (SIPP) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah terintegrasi dengan Website Pengadilan Agama Maumere. Aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Agama Maumere, juga terhubung dengan monitor pada ruang tunggu sidang pada Pengadilan Agama Maumere yang memudahkan masyarakat melihat jadwal sidang di Pengadilan Agama Maumere serta Aplikasi Keuangan (SAKTI) yang telah disosialisasikan oleh Kementerian Keuangan dan akan dioptimalisasikan di Tahun 2020 mendatang.

B. Rekomendasi

1. Agar Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Agama dapat lebih meningkatkan optimalisasi fungsi aplikasi yang telah di launching untuk digunakan pada satuan kerja tingkat pertama sehingga pelayanan masyarakat pencari keadilan dapat dilakukan secara optimal.
2. Agar Mahkamah Agung RI lebih mencanangkan peningkatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) untuk Pejabat Struktural dan Fungsional untuk lebih

meningkatkan pengalaman dan kompetensi SDM aparatur khususnya kualitas SDM berbasis teknologi informasi.

3. Dalam Hal Sumber Daya Manusia hendaknya Mahkamah Agung RI dapat menambah /memindahkan pegawai yang berada disatuan kerja yang jumlah aparturnya lebih banyak sehingga Pengadilan Agama Maumere mendapatkan tenaga Pegawai baru untuk mengisi kekosongan jabatan maupun aparatur saat ini.
4. Agar Mahkamah Agung RI dapat menambah alokasi anggaran baik dalam sarana dan prasarana maupun belanja modal di Pengadilan Agama Maumere khususnya sebagai pendukung meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.



LAMPIRAN

5. SK. Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2021



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE NOMOR : W23-A9/691 /KP.00.3/SK/12/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUNAN PADA PENGADILAN AGAMA MAUMERE TAHUN 2021

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Tahunan di Pengadilan Agama Maumere Tahun 2021 yang efektif dan efisien Maka, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Tahunan di Pengadilan Agama Maumere Tahun 2021;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RB. Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/1/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN PADA PENGADILAN AGAMA MAUMERE TAHUN 2021;**
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor : W23-A9/ 851 /OT.01.1/SK/12/2020 tanggal 28 Desember 2020;
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I Susunan Tim Penyusun Laporan Tahunan pada Pengadilan Agama Maumere Tahun 2021;
- KETIGA : Menetapkan Struktur Tim sebagaimana tercantum lampiran II Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Uraian Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun Laporan Tahunan pada Pengadilan Agama Maumere Tahun 2021 sebagaimana tercantum lampiran III Surat Keputusan ini;
- KELIMA : Agar pegawai yang ditunjuk dan diangkat dalam Tim Penyusun Laporan Tahunan dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM :



Ditetapkan di : Maumere
Pada Tanggal : 01 Desember 2021

S. Rahmih Bao, S.Ag., M.H.
NIP. 197403012006042001

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere

Nomor : W23-A9/ 691 /KP.00.3/SK/12/2021

Tanggal : 01 Desember 2021

Susunan Tim Penyusun Laporan Tahunan
Pada Pengadilan Agama Maumere
Tahun 2021

- 
- A. Pengarah : **Suratnah Bao, S.Ag., M.H.**
(Ketua Pengadilan Agama Maumere)
- B. Ketua Tim Penyusun/Reviu : **Jufri Endo, S.H.I**
- C. Sekretaris Tim : **Muhammad Rizki, S.H**
- D. Koordinator Korektor Anggota : : **1. Yusuf Bahrudin, S.H.I.**
2. Fauzy Arizona, S.Sy
- E. Kordinator Penyajian data Kepaniteraan : **1. Mustajib, S.H.I**
2. Abdullah, S.H., M.H.
Anggota : : **3. Sigit Apriluberta, S.H**
: **4. Hamzah Usman**
: **5. Imam Prabowo, S.H.**
: **6. Ika Asti Hana, S.E.**
- F. Kordinator Penyajian data Kesekretariatan : **1. Muhammad Rizki, S.H**
: **2. Muhammad Rizki, S.H**
Anggota : : **3. Hamzah Usman**
: **4. M. Atsil Husnirafi, S.Kom**

: 5. Muhammad Ikram Muslimin, S.E

: 6. Saudah Yahya, S.H.I

G. Operator Penyusun

: 1. M. Rizki, S.H..

: 2. M. Ikram Muslimin, S.E

: 3. Moh Al Amin.

Mengetapkan di : Maumere
Pada Tanggal : 01 Desember 2021



Suratrah Bdo, S.Ag.,M.H.
NIK. 197403012006042001

- Pelantikan Ketua PA. Maumere di PTA Kupang



- Pertemuan Ketua PA. Maumere ke Bupati Sikka



- Penyerahan Kontrak Kerja Posakum dengan LBH Surya NTT
Oleh Ketua Pengadilan Agama Maumere



- Panitera PA Maumere Menerima Piagam Penghargaan Peringkat ke 2 Penilaian Kinerja E-Letigasi



Pelaksanaan sidang terpadu bersama dukcapil dan Kementrian Agama di Wuring, kel. Wolomarang



Pembagian sembako menjelang Idul Fitri kepada warga sekitar



Pelantikan Wakil ketua Pengadilan Agama Maumere atas nama Yusuf Bahrudin, S.HI



Upacara Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung yang dilakukan secara Daring

Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan secara Daring



Breafing kepada Petugas PTSP oleh Hakim Pengadilan Agama Maumere



Penandatanganan MoU Pelayanan Terpadu antara Ketua Pengadilan Agama Maumere, Bupati Sikka, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sikka